



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG

JALAN TANDURUSA KELURAHAN AERTEMBAGA DUA BITUNG 95526
KOTAK POS 18/Bt BITUNG 95501
TELEPON (0438) 21650, 21681 (LACAK), FAKSIMILE (0438) 31477
LAMAN sekretariat@bpppbitung.com

Bitung, 21 Januari 2026

Yth. :

1. Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan
2. Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

di

Jakarta

SURAT PENGANTAR
B.77/BPPP.BTG/TU.140/I/2026

No.	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Kinerja BPPP Bitung Tahun 2025	1 laporan	Disampaikan dengan hormat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan
Perikanan Bitung,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Natalia

Diterima oleh :

Nama :

Pada Tanggal :

Cap/Tanda tangan :



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS



08
POVERTY GROWTH

LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN (BPPP) BITUNG



Lokasi

📍 Jalan Tandurusa, Kelurahan
Aertembaga Dua, Kecamatan
Aertembaga, Kota Bitung - Provinsi
Sulawesi Utara

Hubungi Kami

📱 bppsdm_bpppbitung
📺 bppsdm_bpppbitung
✉ sekretariat@bpppbitung.com



BerAKHLAK



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya, Laporan Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Bitung Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Bitung Tahun 2025 ini merupakan perwujudan dari pertanggung jawaban atas kinerja pencapaian BPPP Bitung berdasarkan target kinerja dan penggunaan anggaran pada Tahun 2025.

Laporan Kinerja BPPP Bitung Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan kinerja BPPP Bitung Tahun 2025 ini menggambarkan capaian kinerja yang telah diraih dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan untuk Tahun 2025.

Permasalahan dan kendala yang muncul pada Tahun 2025 menjadi perhatian sebagai antisipasi rencana untuk perbaikan kinerja pada periode selanjutnya. Kami berharap dengan telah disusunnya laporan Kinerja Tahun 2025 ini akan diperoleh manfaat dan umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja di lingkungan BPPP Bitung, sehingga masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan pada pelaporan kinerja periode selanjutnya.

Bitung, 21 Januari 2026
Kepala BPPP Bitung,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Natalia

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Tugas dan Fungsi	2
1.4 Keragaan SDM BPPP Bitung	3
1.5 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	4
1.6 Potensi dan Permasalahan	5
BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	7
2.1 Rencana Kerja Pemerintah	7
2.2 Rencana Kegiatan Tahun 2025	10
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	10
2.4 Pengukuran Kinerja	12
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1 Prestasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025	13
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja	13
3.3 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2025	54
BAB IV. PENUTUP	59
4.1 Capaian Kinerja Utama	59
4.2 Permasalahan dan Rekomendasi	60
LAMPIRAN	61

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 1. Keragaan SDM BPPP Bitung	3
Tabel 2. Rencana Kegiatan Tahun 2025.....	10
Tabel 3. Perjanjian Kinerja BPPP Bitung Tahun 2025.....	11
Tabel 4. Target dan Capaian Kinerja BPPP Bitung Tahun 2025	14
Tabel 5. Persentase Lulusan Pelatihan Pelatihan KP Kompeten Satker BPPP Bitung yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (%).....	15
Tabel 6. Perbandingan Persentase Lulusan Pelatihan Pelatihan KP Kompeten Satker BPPP Bitung yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (%) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP	15
Tabel 7. Jumlah Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Dilatih Per Bidang Pelatihan dan Gender	17
Tabel 8. Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Dilatih di BPPP Bitung (orang)	17
Tabel 9. Perbandingan realisasi Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Dilatih di BPPP Bitung (orang) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP	18
Tabel 10. Nilai PNBP Satker BPPP Bitung (rupiah miliar).....	19
Tabel 11. Perbandingan realisasi Nilai PNBP Satker BPPP Bitung (rupiah miliar) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP.....	20
Tabel 12. Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Bitung (%) ...	21
Tabel 13. Perbandingan realisasi Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Bitung (%) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP	22
Tabel 14. Indeks Profesionalitas ASN BPPP Bitung (indeks)	23
Tabel 15. Perbandingan realisasi Indeks Profesionalitas ASN BPPP Bitung (indeks) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP	23
Tabel 16. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Bitung (%)	24
Tabel 17. Perbandingan realisasi Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Bitung (%) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP	25
Tabel 18. Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Bitung (nilai)	26
Tabel 19. Perbandingan realisasi Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Bitung (nilai) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP	27
Tabel 20. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Bitung (%)	28

Tabel 21. Perbandingan realisasi Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Bitung (%) dengan BPPP lingkup BPPSDMKP.....	29
Tabel 22. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Bitung (%)	30
Tabel 23. Perbandingan realisasi Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Bitung (%) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP	31
Tabel 24. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai)	32
Tabel 25. Perbandingan realisasi Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP	33
Tabel 26. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai)	34
Tabel 27. Perbandingan realisasi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Bitung dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP	35
Tabel 28. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh BPPP Bitung (kelompok)	36
Tabel 29. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh BPPP Bitung per bidang dan Gender	37
Tabel 30. Perbandingan realisasi Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh BPPP Bitung (kelompok) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP	38
Tabel 31. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Bitung (kelompok).....	40
Tabel 32. Kelompok Pelaku Usaha / Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya per tingkatan kelas	40
Tabel 33. Perbandingan realisasi Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Bitung (kelompok) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP.....	41
Tabel 34. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Bitung (kelompok)	43
Tabel 35. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Bitung per bidang dan gender	43
Tabel 36. Perbandingan realisasi Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Bitung (kelompok) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP	44
Tabel 37. Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Bitung (unit)	45
Tabel 38. Perbandingan realisasi Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Bitung (unit) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP	46
Tabel 39. Media penyuluhan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di BPPP Bitung (Paket)	47

Tabel 40. Perbandingan realisasi Media penyuluhan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di BPPP Bitung (Paket) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP	48
Tabel 41. Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BPPP Bitung (orang).....	50
Tabel 42. Perbandingan realisasi Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BPPP Bitung (orang) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP	50
Tabel 43. Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BPPP Bitung (orang).....	52
Tabel 44. Perbandingan realisasi Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BPPP Bitung (orang) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP ..	53
Tabel 45. Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2025	54
Tabel 46. Efisiensi Anggaran Per 31 Desember 2025 BPPP Bitung.....	56

DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 1. Struktur Organisasi BPPP Bitung.....	3
Gambar 2. Indeks capaian IKU	12
Gambar 3. Skor Kinerja BPPP Bitung Tahun 2025.....	13
Gambar 4 . Nilai Kinerja Organisasi BPPP Bitung	59

DAFTAR LAMPIRAN

	<i>Halaman</i>
Perjanjian Kinerja BPPP Bitung	62
Surat Tugas Tim Teknis Tata Kelola Kinerja	73

RINGKASAN EKSEKUTIF

BPPSDM KP sesuai dengan fungsinya melaksanakan 3 program utama, yaitu program pengembangan pendidikan KP, program pengembangan pelatihan KP dan program pengembangan penyuluhan KP. Dari 3 program utama tersebut BPPP Bitung sebagai salah satu UPT Kementerian Kelautan dan Perikanan berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala BPPSDM KP sesuai tugas dan fungsinya mendukung program pengembangan pelatihan dan penyuluhan yaitu melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, program dan anggaran, penyelenggaraan, evaluasi dan pelaporan pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan. Selanjutnya dalam pengelolaan kinerjanya, BPPP Bitung melakukan restrukturisasi SAKIP BPPP Bitung yang telah dapat meningkatkan efektifitas organisasi.

Pengukuran capaian kinerja BPPP Bitung Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indicator*) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan <http://kinerjaku.kkp.go.id>. dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BPPP Bitung Tahun 2025 masing-masing perspektif sebagai berikut :

1. Terselenggaranya Pelatihan Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

- Persentase Lulusan Pelatihan Pelatihan KP Kompeten Satker BPPP Bitung yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (%) tercapai sebesar 75,16% dari target yaitu 75% dengan persentase 100,21%;
- Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Bitung (orang) sebesar 475 orang dari target 400 orang dengan persentase 118,75%;
- Nilai PNBP Satker BPPP Bitung (rupiah miliar) sebesar 0,23 rupiah miliar dari target yaitu sebesar 0,189 rupiah miliar dengan persentase 120%;

2. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan:

- Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Bitung (%) tercapai 100% dari target yaitu 100% atau dengan persentase capaian 100%;
- Indeks Profesionalitas ASN BPPP Bitung (indeks) sebesar 83 dari target yaitu 83,82 atau dengan persentase capaian 100,99%;
- Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Bitung yaitu 85% dari target 85% atau dengan persentase capaian 100%;
- Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Bitung (nilai) sebesar 83,15 dari target yaitu 80 atau dengan persentase capaian 103,93%;
- Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Bitung (%) sebesar 95% dari target 80% atau dengan persentase capaian 118,75%;
- Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ (%) yang diumumkan pada SIRUP BPPP Bitung yaitu 100% dari target 80% atau dengan persentase capaian 120%;

- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai) sebesar 97,60 dari target 92 atau dengan persentase capaian 106,09%;
- Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai) sebesar 100 dari target 71,5 atau dengan persentase capaian 120%;

3. Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan :

- Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh BPPP Bitung (kelompok) sebanyak 3.000 kelompok dari target yaitu 2.530 kelompok atau dengan persentase 120%;
- Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Bitung (kelompok) sebanyak 80 kelompok dari target yaitu 110 kelompok atau dengan persentase 120%;
- Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Bitung (kelompok) sebanyak 339 kelompok dari target sebesar 289 kelompok atau dengan persentase 117,30%.
- Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Bitung (unit) sebanyak 28 kelompok dari target sebesar 27 kelompok atau dengan persentase 103,70%;
- Media penyuluhan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di BPPP Bitung (Paket) sebanyak 1 paket dari target 1 paket atau dengan persentase 100%;
- Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BPPP Bitung (orang) sebanyak 4 orang dari target 4 orang atau dengan persentase 100%;.
- Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BPPP Bitung (orang) sebanyak 10 orang dari target 8 orang atau dengan persentase 120%;.

Penyelenggaraan program dan kegiatan di BPPP Bitung secara umum telah terlaksana dengan baik dengan capaian sebesar 110,74 dan menghasilkan tingkat capaian seperti pada masing-masing sasaran kinerja di atas berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan BPPP Bitung Tahun 2025. Capaian sasaran Tahun 2025 ini merupakan kontribusi capaian atas 3 sasaran kegiatan dan 18 Indikator Kinerja Utama yang dilaksanakan oleh BPPP Bitung. Secara umum kinerja BPPP Bitung sangat baik, namun demikian dalam rangka peningkatan kinerja perlu dilakukan perhatian terhadap IKU dengan Target Kinerja Tahunan yang merupakan Indikator Kinerja Utama yang memiliki target tahunan, tetap harus dimonitor perkembangan pelaksanaan kegiatan. Penanggung jawab IKU agar memastikan bahwa capaian akhir tahun dapat dicapai dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan. Bertitik tolak dari capaian ini, diharapkan kinerja di triwulan selanjutnya dapat lebih meningkat.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu tahapan dalam siklus manajemen sebuah organisasi unsur pelaporan mempunyai peranan penting untuk mengetahui sampai sejauh mana hasil yang telah dicapai dari tujuan dari organisasi itu sendiri. Unsur pelaporan semakin penting seiring dengan adanya kebijakan sistem anggaran berbasis kinerja dan berkembangnya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas kinerja bagi instansi pemerintah. Memperhatikan hal tersebut, dalam rangka perwujudan *Good Governance* diperlukan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Kewajiban instansi pemerintah untuk berakuntabilitas kinerja secara internal telah diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Perpres tersebut, seluruh instansi pemerintah setiap tahun wajib menyampaikan laporan informasi kinerja kepada unit kerja yang berada pada tingkat lebih tinggi secara berjenjang. BPPP Bitung sebagai instansi pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kinerja kepada atasannya. Penyampaian laporan kinerja BPPP Bitung Tahun 2025 ini dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis BPPP Bitung, khususnya Penetapan Kinerja tahun 2025. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja ini juga ditujukan sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja BPPP Bitung di masa yang akan datang.

1.2. Tujuan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap K/L wajib melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi dan menyampaikan Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2025 kepada Kepala BPPSDM KP melalui Kepala Pusat pelatihan dan Penyuluhan KP. Penyusunan LKJ BPPP Bitung Tahun 2025 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala BPPP Bitung kepada Kepala BPPSDM KP atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan. Adapun tujuan penyusunan LKJ adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran BPPP Bitung selama Tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu simpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan dan strategi tahun berikutnya.

1.3. Tugas dan Fungsi

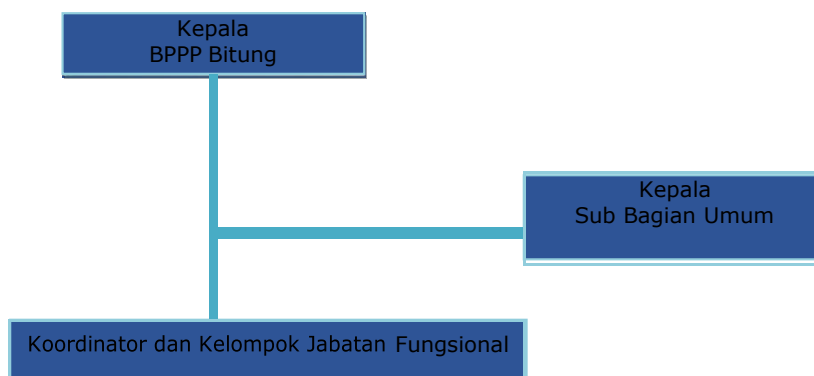
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.87/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan, bahwa Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan yang selanjutnya disingkat BPPP, merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Dalam Peraturan Menteri KP ini, terdapat 5 (lima) BPPP, salah satu diantaranya adalah BPPP Bitung. Selanjutnya setiap BPPP tersebut mempunyai tugas “melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, program dan anggaran, penyelenggaraan, evaluasi dan pelaporan pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan” dan dalam melaksanakan tugas tersebut, BPPP kemudian menyelenggarakan sejumlah fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran serta pelaporan di bidang pelatihan dan penyuluhan perikanan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan pelatihan dan penyuluhan;
- c. Pelatihan teknis dan manajerial di bidang perikanan;
- d. Penyusunan materi, metodologi dan pelaksanaan penyuluhan perikanan;
- e. Pemantauan kebutuhan pembentukan jaringan pengembangan tenaga teknis dan manajerial di bidang perikanan;
- f. Pengelolaan prasarana dan sarana pelatihan dan penyuluhan;
- g. Pengembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- h. Penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS), swadaya, dan swasta; dan
- i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut BPPP dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh Subbagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan tugas masing-masing, sebagai berikut :

- a. Subbagian Umum, mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan, serta pengelolaan prasarana dan sarana pelatihan dan penyuluhan perikanan;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPPP Bitung sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.87/KEPMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung, Struktur Organisasi di BPPP Bitung dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi BPPP Bitung

1.4. Keragaan SDM BPPP Bitung

Jumlah keseluruhan pegawai BPPP Bitung sampai dengan 31 Desember 2025 sebanyak 393 orang, terdiri dari CPNS 1 orang, PNS 249 orang, 122 orang PPPK, 8 orang PPPK Paruh Waktu, PJLP 13 orang. Keragaan SDM BPPP Bitung disajikan pada Tabel 1 berikut ini :

Tabel 1. Keragaan SDM BPPP Bitung

PNS BPPP Bitung berdasarkan Golongan		
No.	Uraian	Jumlah
1	Golongan II	59
2	Golongan III	167
3	Golongan IV	24
	Jumlah	250

PNS BPPP Bitung berdasarkan Tingkat Pendidikan		
No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SLTA	30
2	D3	58
3	S1	128
4	D4	13
5	S2	21
	Jumlah	250

PNS BPPP Bitung berdasarkan Kelompok Umur									Jumlah 250
≤25	25-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-57	>58	
0	20	14	46	59	53	34	17	7	
PPPK BPPP Bitung berdasarkan Kelompok Umur								Jumlah 130	
≤25		25-35		36-45		45-55			
0		52		70		8			
PNS dan PPPK BPPP Bitung berdasarkan Jenis Kelamin									
No	Pegawai				Laki-Laki	Perempuan	Jumlah		
1	CPNS/PNS				135	115	250		
2	PPPK/PPPK Paruh Waktu				86	44	130		

1.5. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Menpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri KP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan KKP, Laporan Kinerja BPPP Bitung Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. Kata Pengantar, pada bagian ini menyajikan pengesahan dari Kepala Balai;
- b. Ringkasan Eksekutif, pada bagian ini menyajikan ringkasan isi dari laporan kinerja BPPP Bitung Tahun 2025 yang berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala yang dihadapi;
- c. Bab I Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan pegawai di BPPP Bitung;
- d. Bab II Perencanaan Kinerja, pada bab ini dibagi per sub bab yang berisi rencana kerja tahunan dan penetapan kinerja tahun 2025 serta Pengukuran Kinerja;
- e. Bab III Akuntabilitas Kinerja, bab ini dijelaskan hasil capaian kinerja dari indikator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya;
- f. Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja BPPP Bitung Tahun 2025 dan rekomendasi perbaikan ke depan untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.;
- g. Lampiran, disajikan perjanjian kinerja dan lampiran yang dianggap perlu.

1.6. Potensi dan Permasalahan

a. Potensi

Pengembangan sumberdaya manusia (SDM) dibidang kelautan dan perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian target kinerja pembangunan kelautan dan perikanan. Peran strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan serta riset kelautan dan perikanan yang diarahkan untuk mendorong dan mempercepat peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan. BPPP Bitung memiliki 2 (dua) kategori wilayah kerja/pengembangan yang sangat luas yaitu :

- Wilayah pengembangan/kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada kegiatan pelatihan yang meliputi 7 Provinsi dengan 79 Kabupaten/Kota, yaitu : Provinsi Sulawesi Utara (15 Kab/Kota), Gorontalo (6 Kab/Kota), Sulawesi Tengah (13 Kab/Kota), Sulawesi Barat (6 Kab), Sulawesi Selatan (24 Kab/Kota), Kalimantan Timur (10 Kab/Kota) dan Kalimantan Utara (5 Kab/Kota) dengan potensi dan peluang yang harus dikelola oleh BPPP Bitung;

- Wilayah pengembangan/kerja dalam pelaksanaan tugas pada kegiatan Penyuluhan atau sebagai Satminkal Penyuluh Perikanan yang meliputi 4 Provinsi dengan 39 Kabupaten/Kota, yaitu : Provinsi Sulawesi Utara (15 Kab/Kota), Gorontalo (6 Kab/Kota), Sulawesi Tengah (13 Kab/Kota), dan Kalimantan Utara (5 Kab/Kota).

Keberhasilan pencapaian target ditentukan oleh sumberdaya yang dimiliki oleh suatu organisasi. Berikut adalah potensi sumberdaya BPPP Bitung dalam mencapai tujuan organisasi :

- 1) Tersedianya SDM yang berlatar pendidikan formal yang memadai dan bersertifikat kompetensi dan keahlian serta berdedikasi;
- 2) Memiliki prasarana dan sarana yang dapat menunjang penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan;
- 3) Sebagian besar SDM BPPP Bitung memiliki usia muda yang produktif;
- 4) BPPP Bitung tersertifikasi SNI ISO 9001:2015;
- 5) Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan diklat sesuai manajemen mutu;
- 6) Adanya mandat dari Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan kepada BPPP Bitung sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK);
- 7) Tersedianya akses internet di lingkungan Balai.

Disamping potensi tersebut di atas terdapat peluang, sebagai berikut:

- 1) Memaksimalkan pengelolaan potensi Sumber Daya Alam KP dengan meningkatkan kompetensi pelaku utama/usaha KP;
- 2) Adanya jenjang kerjasama pelatihan dengan lembaga lain;
- 3) Adanya tuntutan dunia kerja yang mempersyaratkan sertifikasi kompetensi kerja;
- 4) Adanya peluang peningkatan profesionalisme bagi tenaga pelatihan.

b. Permasalahan

Sebagai Lembaga pelatihan dan penyuluhan yang terus berkembang menjadi pilihan utama stakeholder dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia kelautan dan perikanan, BPPP Bitung memiliki beberapa hal yang penting untuk diperbaiki antara lain :

- Aspek penyelenggaraan pelatihan KP :
 - Ketersediaan tenaga pelatih (Instruktur dan Widyaiswara) yang terus berkurang dikarenakan beberapa orang sudah memasuki usia purnatugas dan mutasi
 1. Widyaiswara Pengolahan tersisa 2 orang di Tahun 2026
 2. Instruktur Mesin tersisa 2 orang di Tahun 2026
 3. Instruktur dan Widyaiswara Budidaya tersisa 4 orang di Tahun 2026
 4. Instruktur dan Widyaiswara Penangkapan tersisa 6 orang di Tahun 2026
 - Sarana dan prasarana pelatihan belum sesuai dengan standar minimal pelatihan yang ditetapkan dan tidak lagi sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini;

- Aspek penyelenggaraan penyuluhan KP :
 - Kualitas dan kuantitas penyebaran penyuluh perikanan masih belum memadai;
 - Sarana dan prasarana penyuluhan belum mencukupi kebutuhan pelaksanaan tugas penyuluh. Tahun 2025 anggaran BOP diblokir.

BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Dalam pengelolaan kinerja organisasi, BPPP Bitung melaksanakan secara terukur dan terstruktur dengan penekanan pada empat perspektif yang saling berimbang, yaitu *stakeholder perspective*, *Customer perspective*, *Internal Process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Untuk meningkatkan kinerja organisasi, BPPP Bitung telah melakukan penerapan pengelolaan kinerja secara penuh termasuk melakukan penyempurnaan dalam rangka mendukung penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan BPPP Bitung dan pelaksanaan SAKIP yang lebih baik.

2.1. Rencana Kerja Pemerintah

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dalam masa transisi, menjadi langkah awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 – 2045 sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang Undang Nomor 59 Tahun 2024. Selain itu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan. RKP Tahun 2025 dengan tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan dan/atau Kemiskinan Ekstrem.

2.1.1. Arah dan Kebijakan KKP

Arah dan kebijakan KKP Tahun 2025 dilaksanakan dengan prinsip ekonomi biru sebagaimana tuntutan pembangunan global, terdiri atas:

1. Memperluas kawasan konservasi laut;
2. Penangkapan ikan terukur berbasis kuota penangkapan ikan;
3. Pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan;
4. Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
5. pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut.

Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tersebut akan diperkuat dengan:

1. Peningkatan daya saing hasil kelautan dan perikanan yang didukung dengan penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk peningkatan konsumsi domestik dan ekspor;

2. Peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan *advanced technology*; dan
3. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

2.1.2 Program Tahun 2025

Program Tahun 2025 melanjutkan nomenklatur dan jumlah program pada tahun 2022 sebanyak 5 (lima) program yang telah menggunakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) sebagai salah satu upaya reformasi perencanaan dan penganggaran. RSPP diharapkan dapat mewujudkan implementasi kebijakan money follow program priority, memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja, meningkatkan integrasi belanja antar kementerian/lembaga untuk tingkat Pemerintah Pusat, dan integrasi belanja pusat-daerah, serta mewujudkan keselarasan rumusan nomenklatur program, kegiatan dan output kegiatan yang mencerminkan real work atau konkret.

2.1.3. Tujuan

Tujuan pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan BPPP Bitung merupakan penjabaran dari visi dan misi KKP yang juga berdasarkan tujuan BPPSDM KP dan Puslatluh KP. Untuk itu tujuan pelatihan dan penyuluhan KP adalah:

1. Menghasilkan SDM profesional dan berdaya saing guna mewujudkan pembangunan sektor KP berkelanjutan, didukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani;
2. Meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui penyelenggaraan penyuluhan;
3. Meningkatkan pemanfaatan inovasi teknologi mendukung industrialisasi KP yang berdaya saing, dan;
4. Menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan manajerial SDM sesuai tata kelola pemerintahan yang baik.

2.1.4. Sasaran

Sasaran Kegiatan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan 2025-2029 merupakan penjabaran Visi dan Misi pembangunan kelautan dan perikanan. Sasaran ditetapkan melalui tahapan-tahapan berdasarkan tujuan yang akan dicapai dan arah kebijakan yang tersusun ke dalam 3 (tiga) Sasaran Kegiatan yakni:

1. Terselenggaranya Pelatihan Kelautan dan Perikanan
2. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
3. Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

BPPP Bitung memiliki 3 (tiga) Sasaran Kegiatan yang dijabarkan dalam 18 (Delapan Belas) Indikator Kinerja program pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan beserta target yang akan dicapai Tahun 2025.

Sasaran Kegiatan pertama (SK-1) yang akan dicapai adalah " Terselenggaranya Pelatihan Kelautan dan Perikanan ", dengan Indikator Kinerja :

1. Persentase Lulusan Pelatihan KP Kompeten Satker BPPP Bitung yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (%) dengan target Tahun 2025 sebesar 75%.
2. Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Bitung (orang) dengan target Tahun 2025 sebesar 400 orang.
3. Nilai PNBP Satker BPPP Bitung (Rupiah Miliar) dengan target Tahun 2025 sebesar 0.189 rupiah miliar.

Sasaran Kegiatan kedua (SK-2) yang akan dicapai adalah Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, dengan indikator kinerja :

1. Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Bitung (%) dengan target Tahun 2025 sebesar 100%
2. Indeks Profesionalitas ASN BPPP Bitung (indeks) dengan target Tahun 2025 sebesar 83%
3. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Bitung (%) dengan target tahun 85%
4. Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Bitung (nilai) dengan target Tahun 2025 sebesar 80
5. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Bitung (%) dengan target Tahun 2025 sebesar 80%
6. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Bitung (%) dengan target Tahun 2025 sebesar 80%
7. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai) dengan target Tahun 2025 sebesar 92
8. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai) dengan target Tahun 2025 sebesar 71,5

Sasaran Kegiatan Ketiga (SK-3) Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, dengan indikator kinerja :

1. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh BPPP Bitung (kelompok) dengan target Tahun 2025 sebesar 2.530 kelompok
2. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Bitung (kelompok) dengan target Tahun 2025 sebanyak 80 kelompok
3. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Bitung (kelompok) dengan target Tahun 2025 sebesar 289 kelompok

4. Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Bitung (unit) dengan target Tahun 2025 sebesar 27 unit.
5. Media Penyuluhan Sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BPPP Bitung (paket) dengan target Tahun 2025 sebesar 1 paket.
6. Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BPPP Bitung (orang) dengan target Tahun 2025 sebesar 4 orang
7. Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BPPP Bitung (orang) dengan target Tahun 2025 sebesar 8 orang

2.2. Rencana Kegiatan Tahun 2025

Tahun 2025 BPPP Bitung melaksanakan Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi serta Program Dukungan Manajemen dengan pagu anggaran awal sebesar Rp.51.160.550.000,- selanjutnya mengalami revisi pengalihan pagu anggaran ke satker lain, sehingga pada triwulan kedua pagu anggaran BPPP Bitung sebesar Rp.51.016.037.000,-. Pada triwulan ketiga terjadi perubahan anggaran BPPP Bitung sebesar Rp. 46.324.046.000,-, dengan rincian kegiatan, yaitu :

Tabel 2. Rencana Kegiatan Tahun 2025

NO	Sasaran Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp) (Revisi I)	Alokasi Anggaran (Rp) (Revisi II)
I	DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	5.544.810.000	2.510.574.000
	1. DL.2375 Pelatihan Kelautan dan Perikanan	3.188.960.000	166.574.000
	2. DL.7020 Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	2.355.850.000	2.344.000.000
II	WA Program Dukungan Manajemen	45.471.227.000	43.813.472.000
	1. WA.2378 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	45.471.227.000	43.813.472.000
Total Anggaran		51.016.037.000	46.324.046.000

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dalam upaya untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi BPPSDM KP harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Berdasarkan, visi dan misi tersebut selanjutnya dirumuskan Sasaran Kegiatan BPPP Bitung. Berkaitan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga BPPP Bitung memiliki 2 perjanjian kinerja yaitu Perjanjian Kinerja dengan Pusat Pelatihan dan Pusat Penyuluhan. Adapun Perjanjian Kinerja BPPP Bitung pada Tahun 2025 sebagai berikut :

2.3.1. Perjanjian Kinerja BPPP Bitung Tahun 2025.

Tabel 3. Perjanjian Kinerja BPPP Bitung Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET PK AWAL	TARGET PK REVISI
1	Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan Pelatihan Pelatihan KP Kompeten Satker BPPP Bitung yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (%)	1.713 orang	75%
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Bitung (orang)	2.437	400
		3	Nilai PNBSP Satker BPPP Bitung (rupiah miliar)	0,18	0,189
		4	Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi di BPPP Bitung (orang)	30	0
2	Terselenggaranya Tata Kelola Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	5	Sarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Bitung (unit)	1	0
3	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	6	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Bitung (%)	100	100
		7	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Bitung (indeks)	83	83
		8	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Bitung (%)	85	85
		9	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Bitung (nilai)	80	80
		10	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Bitung (%)	80	80
		11	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Bitung (%)	80	80
		12	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai)	92	92
		13	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai)	71,5	71,5
4	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh BPPP Bitung (kelompok)	2.998	2.530
		2	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Bitung (kelompok)	80	80
		3	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Bitung (kelompok)	296	289
		4	Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Bitung (unit))	27	27
		5	Media penyuluhan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di BPPP Bitung (Paket)	1	1
		6	Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BPPP Bitung (orang)	4	4
		7	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BPPP Bitung (orang)	8	8

2.4. Pengukuran Kinerja

2.4.1 Rumus Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja BPPP Bitung tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi pada masing-masing indikator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada manual IKU pada masing-masing indikator. Perhitungan Indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

1. Nilai 100 – 120 adalah kategori istimewa dengan kode warna biru;
2. Nilai 90 - < 110 adalah kategori baik dengan kode warna hijau;
3. Nilai 70 - < 90 adalah kategori cukup dengan kode warna kuning;
4. Nilai 50 - < 70 adalah kategori kurang dengan kode warna merah;
5. Untuk nilai < 50 adalah kategori sangat kurang dengan kode warna hitam; Adapun status Indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:

Warna	Keterangan
Istimewa	Nilai 110 – 120
Baik	Nilai 90 - < 110
Cukup	Nilai 70 - < 90
Kurang	Nilai 50 - < 70
Sangat kurang	Untuk nilai < 50

Gambar 2. Indeks Capaian IKU

Sumber : kinerjaku.kkp.go.id

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKU pada masing- masing Indikator.

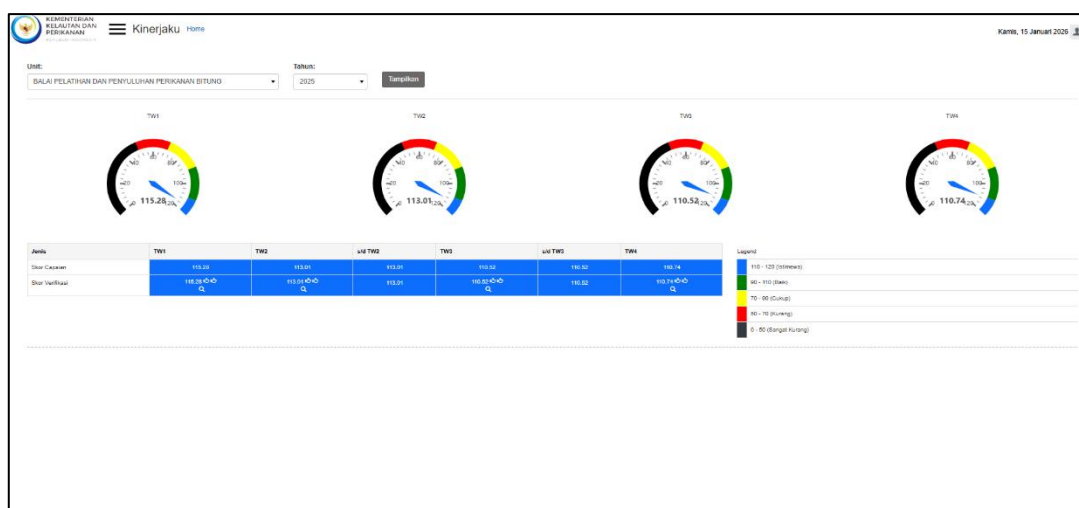
2.4.2 Metode Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran kinerja BPPP Bitung dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12). Selaku pihak yang bertanggungjawab dalam pengukuran dan pelaporan kinerja telah ditugaskan dan ditetapkan melalui Surat Tugas Kepala BPPP Bitung Nomor : B.27/BPPP.BTG/TU.140/I/2025 tanggal 8 Januari 2025 yaitu Tim Teknis Tata Kelola Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung Tahun 2025. Keanggotaan tim terdiri dari pegawai yang memiliki kualifikasi terkait pengukuran dan pelaporan kinerja dibuktikan dengan sertifikat.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Prestasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

Pelaksanaan evaluasi kinerja BPPP Bitung pada tahun anggaran 2025 dilakukan melalui analisis komparatif antara target yang telah direncanakan dengan realisasi Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) pada setiap perspektif organisasi. Seluruh proses dokumentasi dan validasi data pengukuran kinerja tersebut diintegrasikan melalui sistem informasi resmi pada laman <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Berdasarkan hasil pengukuran sistematis tersebut, BPPP Bitung berhasil mencatatkan nilai capaian kinerja sebesar 110,74%. Capaian ini direpresentasikan melalui Nilai Kinerja Organisasi (NKO) dengan indikator warna biru, yang menunjukkan bahwa seluruh target yang ditetapkan sepanjang tahun 2025 tidak hanya berhasil direalisasikan, tetapi juga dicapai dengan predikat Istimewa. Sebagaimana tertera pada Gambar 3, hasil ini mencerminkan keberhasilan institusi dalam menjalankan tugas dan fungsi secara optimal melampaui standar kinerja yang telah ditentukan.



Gambar 3. Skor Kinerja BPPP Bitung Tahun 2025

Sumber : kinerjaku.kkp.go.id

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPPP Bitung. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran-

sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategis BPPP Bitung yang menjadi kontrak kerja pada Tahun 2025 dapat dicapai.

Tabel 4. Target dan Capaian Kinerja BPPP Bitung Tahun 2025

No.	Sasaran Kinerja	No.	Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Persentase Realisasi (%)
1	Terselenggaranya Pelatihan Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan Pelatihan Pelatihan KP Kompeten Satker BPPP Bitung yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (%)	75	75,16	100,21
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Bitung (orang)	400	475	118,75
		3	Nilai PNBP Satker BPPP Bitung (rupiah miliar)	0,189	0,23	120,00
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	4	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Bitung (%)	100	100	100,00
		5	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Bitung (indeks)	83	83,82	100,89
		6	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Bitung (%)	85	85	100,00
		7	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Bitung (nilai)	80	83,15	103,94
		8	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Bitung (%)	80	95	118,75
		9	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Bitung (%)	80	100	120,00
		10	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai)	92	97,60	106,09
		11	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai)	71,5	100	120,00
3	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	12	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh BPPP Bitung (kelompok)	2.530	3.000	120,00
		13	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Bitung (kelompok)	80	110	120,00
		14	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Bitung (kelompok)	289	339	117,30
		15	Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Bitung (unit)	27	28	103,70
		16	Media Penyuluhan Sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BPPP Bitung (paket)	1	1	100,00
		17	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BPPP Bitung (orang)	4	4	100,00
		18	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BPPP Bitung (orang)	8	10	120,00

Sumber : Aplikasi Kinerja KKP

Sasaran Kegiatan 1. Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan

• IKS.01.01 Persentase Lulusan Pelatihan Pelatihan KP Kompeten Satker BPPP Bitung yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (%)

Jumlah lulusan pelatihan KP yang menerapkan hasil pelatihan (meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap) yang terserap di dunia usaha, dunia industri dan/atau dunia kerja atau wirausaha KP yang dihitung melalui evaluasi pelatihan dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Persentase Lulusan Pelatihan Pelatihan KP Kompeten Satker BPPP Bitung yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (%)

Terselenggaranya Pelatihan Kelautan dan Perikanan									
IK 1. Persentase Lulusan Pelatihan Pelatihan KP Kompeten Satker BPPP Bitung yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (%)									
Realisasi Capaian 2021 - 2024				2025				Rencana Kegiatan BPPP Bitung 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024 - 2025	Target 2025	% Capaian Thd Target 2025
62,58	62,58	70,28	72,00	75,00	75,16	100,21	4,39	75,00	100,21

Kinerja BPPP Bitung dalam aspek penyerapan lulusan pelatihan menunjukkan tren pertumbuhan yang progresif dan konsisten pada periode 2021 hingga 2024, di mana tingkat penyerapan meningkat dari 62,58% menjadi 72,00%. Momentum positif tersebut menjadi fondasi strategis dalam memasuki periode Rencana Kegiatan BPPP Bitung 2025–2029. Pada tahun transisi sekaligus tahun pertama rencana lima tahunan tersebut, yakni tahun 2025, target penyerapan ditetapkan sebesar 75,00%. Berdasarkan data realisasi, BPPP Bitung tidak hanya berhasil memenuhi standar tersebut, namun melampauinya dengan capaian sebesar 75,16%, atau setara dengan 100,21% dari target yang ditetapkan. Keberhasilan ini juga mencatatkan peningkatan kinerja sebesar 4,39% dibandingkan tahun sebelumnya, yang mengindikasikan bahwa implementasi rencana strategis jangka menengah telah berjalan secara efektif dan responsif terhadap kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Mengingat realisasi kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) ini belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena keterbatasan institusi dengan kompetensi yang setara, maka evaluasi dilakukan melalui studi komparasi dengan unit kerja di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 6. Perbandingan realisasi Persentase Lulusan Pelatihan Pelatihan KP Kompeten Satker BPPP Bitung yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (%) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP

No	Nama Satker	Target Capaian Satker (%)	Realisasi Capain Satker (%)	Persentase Realisasi Capaian Satker (%)
1	BPPP Medan	75,00	76,75	102,33
2	BPPP Tegal	75,00	95,79	120,00
3	BPPP Banyuwangi	75,00	83,11	110,81
4	BPPP Ambon	75,00	75,00	100,00
5	BPPP Bitung	75,00	75,16	100,21

Berdasarkan data capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Tabel 6 mengenai Persentase Lulusan Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri, dan/atau Dunia Kerja, seluruh satuan kerja BPPP lingkup BPPSDMKP menunjukkan performa yang sangat impresif dengan tingkat keberhasilan melampaui target yang ditetapkan sebesar 75,00%. BPPP Tegal mencatatkan efektivitas tertinggi dengan persentase realisasi mencapai 120,00% melalui capaian sebesar 95,79%. Performa signifikan juga ditunjukkan oleh BPPP Banyuwangi dengan persentase realisasi 110,81% (capaian 83,11%) dan BPPP Medan sebesar 102,33% (capaian 76,75%). Sementara itu, BPPP Bitung dan BPPP Ambon berhasil memenuhi target dengan persentase realisasi masing-masing sebesar 100,21% (75,16%) dan 100,00% (75%). Hasil ini mengindikasikan bahwa implementasi program pelatihan telah berjalan secara efektif dan responsif terhadap kebutuhan sektor industri, sehingga seluruh satuan kerja berhasil mencapai ambang batas kinerja yang optimal.

Faktor-faktor strategis yang menunjang keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut meliputi ketersediaan pedoman penyelenggaraan pelatihan yang komprehensif, dukungan instruktur yang kompeten di bidangnya, serta pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu, penggunaan pangkalan data (database) penyelenggaraan pelatihan berfungsi sebagai instrumen pengendalian yang efektif dalam memantau setiap tahapan pelaksanaan. Keberhasilan ini juga didukung secara krusial oleh peran penyuluh perikanan dalam memberikan pendampingan berkelanjutan bagi purnawidya pascapelatihan. Sebagai langkah penguatan, kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara periodik guna memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dalam upaya mempertahankan serta meningkatkan capaian kinerja tersebut pada tahun 2025, BPPP Bitung telah menetapkan beberapa langkah strategis, antara lain: (1) pelaksanaan evaluasi pascapelatihan yang dirancang secara sistematis untuk mengidentifikasi keterserapan purnawidya di Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA); (2) melakukan analisis mendalam terhadap instrumen evaluasi pascapelatihan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan mutu penyelenggaraan pelatihan di masa mendatang; serta (3) optimalisasi peran penyuluh perikanan dalam memfasilitasi pengisian instrumen evaluasi sekaligus memberikan pendampingan teknis atas penerapan kompetensi hasil pelatihan oleh para lulusan.

- **IKSK.01.02 Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Bitung (orang)**

Pelatihan bagi masyarakat kelautan dan perikanan Tahun 2025 dilaksanakan dengan tatap muka. Pelatihan tersebut menggunakan anggaran APBN dalam DIPA BPPP Bitung TA 2025. Pelatihan yang diselenggarakan BPPP Bitung Tahun 2025 terdiri dari pelatihan tatap muka dengan beberapa bidang pelatihan.

Tabel 7. Jumlah Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Dilatih Per Bidang Pelatihan dan Gender

No	Bidang Pelatihan	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (Orang)
1	Budidaya	81	19	100
2	Kepelautan	298	2	300
3	Pengolahan	31	44	75
	Total	410	65	475

Berdasarkan data pada Tabel 7, jumlah masyarakat kelautan dan perikanan yang telah mengikuti pelatihan tercatat sebanyak 475 orang, yang terdistribusi ke dalam tiga bidang kompetensi utama, yaitu budidaya, kepelautan, dan pengolahan. Komposisi peserta secara keseluruhan terdiri dari 410 laki-laki dan 65 perempuan, yang mengindikasikan bahwa partisipasi laki-laki masih mendominasi di seluruh bidang pelatihan, khususnya pada sektor kepelautan. Meskipun demikian, keterlibatan peserta perempuan pada ketiga bidang tersebut merefleksikan adanya peningkatan peran dan kontribusi perempuan dalam program pengembangan sumber daya manusia yang diselenggarakan oleh BPPP Bitung. Seluruh rangkaian pelatihan ini dilaksanakan sebagai bagian integral dari program strategis percepatan pemberantasan kemiskinan ekstrem. Adapun rincian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Bitung disajikan pada tabel berikut:

Tabel 8. Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Dilatih di BPPP Bitung (orang)

Terselenggaranya Pelatihan Kelautan dan Perikanan									
IK 2. Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Bitung (Orang)									
Realisasi Capaian				2025				Rencana Kegiatan BPPP Bitung 2025-2029	
2021 - 2024									
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	% Penurunan 2024 - 2025	Target 2025	% Capaian Thd Target 2025
1.550	2.120	3.130	2.936	400	475	118,75	83,82	2.437	19,49

Berdasarkan data pada Tabel 8, jumlah masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih oleh BPPP Bitung menunjukkan tren kenaikan yang positif pada periode 2021 hingga 2023, dengan puncak capaian sebanyak 3.130 orang. Namun, angka tersebut mulai mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 2.936 orang, yang disebabkan oleh transisi metode pelatihan di mana sistem daring penuh (full online) sudah tidak lagi dilaksanakan. Tren penurunan ini berlanjut cukup signifikan pada

tahun 2025 dengan realisasi sebesar 475 orang, yang utamanya dipengaruhi oleh adanya kebijakan efisiensi serta blokir anggaran yang membatasi ruang gerak pelaksanaan kegiatan. Jika merujuk pada Rencana Kegiatan BPPP Bitung 2025–2029, target untuk tahun 2025 ditetapkan sebanyak 2.437 orang, sehingga capaian saat ini baru terpenuhi sebesar 19,49%. Kondisi ini memperlihatkan adanya tantangan besar dalam memenuhi target jangka menengah akibat kendala anggaran yang sedang dihadapi. Mengingat belum adanya standar nasional pada institusi dengan kompetensi yang setara, maka evaluasi kinerja dilakukan melalui perbandingan dengan unit kerja di lingkup BPPSDMKP sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 9. Perbandingan realisasi Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Dilatih di BPPP Bitung (orang) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP

No	Nama Satker	Target Capaian Satker (Orang)	Realisasi Capaian Satker (Orang)	Persentase Realisasi Capaian Satker (%)
1	BPPP Medan	430	456	106,04
2	BPPP Tegal	12.540	15.629	120,00
3	BPPP Banyuwangi	1.030	1.770	120,00
4	BPPP Ambon	400	715	120,00
5	BPPP Bitung	400	475	118,75

Berdasarkan data pada Tabel 9, realisasi kinerja BPPP Bitung yang mencapai 475 orang telah melampaui target internal satuan kerja tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 400 orang, dengan tingkat capaian sebesar 118,75%. Jika dibandingkan dengan unit kerja lain di bawah naungan BPPSDMKP, performa BPPP Bitung menunjukkan posisi yang kompetitif, di mana persentase capaiannya melampaui BPPP Medan (106,04%) serta mendekati pencapaian BPPP Tegal, BPPP Banyuwangi, dan BPPP Ambon yang masing-masing mencatatkan angka 120,00%. Keberhasilan pelampauan target ini didukung oleh beberapa faktor strategis, antara lain ketersediaan pedoman penyelenggaraan pelatihan yang komprehensif, dukungan instruktur dengan kompetensi yang relevan, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu, pemanfaatan basis data penyelenggaraan pelatihan berperan penting sebagai instrumen pengendalian efektivitas pelaksanaan kegiatan. Pencapaian ini juga diperkuat melalui koordinasi intensif dengan pemangku kepentingan (stakeholder) terkait, seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, perguruan tinggi, sektor swasta, dan penyuluh perikanan. Langkah strategis lainnya mencakup penyusunan jadwal pelaksanaan pelatihan yang terukur berdasarkan prioritas program BPPSDMKP serta optimalisasi ketersediaan anggaran dan sumber daya yang ada.

• IKSK.01.03 Nilai PNBP Satker BPPP Bitung (Rupiah Miliar)

Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat diluar penerimaan perpajakan dan hibah yang dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.

Tabel 10. Nilai PNBP Satker BPPP Bitung (rupiah miliar)

Terselenggaranya Pelatihan Kelautan dan Perikanan									
IK 3. Nilai PNBP Satker BPPP Bitung (Rupiah Miliar)									
Realisasi Capaian				2025				Rencana Kegiatan BPPP Bitung 2025-2029	
2021 - 2024									
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	% Penurunan 2024 - 2025	Target 2025	% Capaian Thd Target 2025
-	-	0,28	0,65	0,189	0,23	120,00	64,15	0,17	120,00

Berdasarkan data pada Tabel 10, Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut belum tersedia pada tahun 2021 dan 2022 (IKU baru tahun 2023). Pengukuran kinerja baru diimplementasikan pada tahun 2023 dengan capaian sebesar 0,28 rupiah miliar, yang kemudian mengalami peningkatan signifikan menjadi 0,65 rupiah miliar pada tahun 2024. Memasuki tahun 2025, BPPP Bitung menetapkan target sebesar 0,189 rupiah miliar dan berhasil melampauinya dengan realisasi sebesar 0,23 rupiah miliar, sehingga persentase capaian kinerjanya mencapai 120,00%. Meskipun melampaui target tahunan, realisasi tahun 2025 menunjukkan penurunan sebesar 64,15% dibandingkan tahun 2024 yang disebabkan oleh kebijakan efisiensi serta blokir anggaran. Namun, jika merujuk pada dokumen Rencana Kegiatan BPPP Bitung 2025–2029 yang menetapkan target tahun 2025 sebesar 0,17 rupiah miliar, maka realisasi saat ini telah mencapai 120,00% dari target perencanaan strategis tersebut. Sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ini dikontribusikan melalui layanan sewa tanah, gedung, dan bangunan, pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi, penjualan hasil komoditas perikanan dan budidaya, serta layanan pendidikan dan pelatihan. Mengingat realisasi kinerja IKU ini belum dapat diperbandingkan dengan standar nasional karena belum tersedianya institusi dengan kompetensi yang setara, maka evaluasi dilakukan melalui studi komparasi dengan unit kerja di lingkup BPPSDMKP sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 11. Perbandingan realisasi Nilai PNBP Satker BPPP Bitung (rupiah miliar)
dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP

No	Nama Satker	Target Capaian Satker (Rupiah Miliar)	Realisasi Capain Satker (Rupiah Miliar)	Persentase Realisasi Capaian Satker (%)
1	BPPP Medan	0,055	0,057	103,64
2	BPPP Tegal	14,26	25,85	120,00
3	BPPP Banyuwangi	0,319	0,402	120,00
4	BPPP Ambon	0,735	0,778	105,85
5	BPPP Bitung	0,189	0,233	120,00

Berdasarkan data capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan BPPSDMKP, seluruh satuan kerja menunjukkan performa positif dengan keberhasilan melampaui target yang telah ditetapkan. BPPP Bitung mencatatkan realisasi sebesar 0,23 rupiah miliar dari target 0,189 rupiah miliar, yang menghasilkan persentase capaian sebesar 120,00%. Tingkat efektivitas kinerja ini setara dengan BPPP Tegal, yang mencatatkan realisasi nominal tertinggi sebesar 25,85 rupiah miliar, dan BPPP Banyuwangi dengan realisasi sebesar 0,402 rupiah miliar, di mana keduanya juga mencapai persentase 120,00%. Sementara itu, BPPP Medan dan BPPP Ambon masing-masing mencatatkan persentase realisasi sebesar 103,64% dan 105,85%. Secara keseluruhan, data ini menegaskan bahwa BPPP Bitung memiliki tingkat efisiensi pencapaian target yang kompetitif dan berada pada kelompok performa tertinggi bersama BPPP Tegal serta BPPP Banyuwangi.

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ini didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sehingga meningkatkan daya tarik layanan bagi pengguna jasa, serta didorong oleh komitmen kuat pimpinan dalam mengoptimalkan penerimaan negara. Langkah-langkah strategis yang telah diimplementasikan meliputi peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan serta perluasan promosi melalui media sosial. Meskipun perolehan PNBP sangat bergantung pada fluktuasi pemanfaatan layanan oleh pemangku kepentingan dan ketersediaan fasilitas sehingga sulit diprediksi secara pasti setiap periodenya, BPPP Bitung tetap berupaya mengoptimalkan potensi yang ada. Pada tahun 2025, strategi peningkatan PNBP difokuskan pada pemanfaatan hasil samping pengolahan perikanan, sewa rumah dinas, area foodcourt, asrama, ruang koperasi, serta retribusi karcis masuk eduwisata.

Sasaran Kegiatan 2. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

• IKSK.02.01 Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Bitung (%)

Layanan Dukungan manajemen internal meliputi dokumen perencanaan anggaran, perencanaan kinerja, revidi renstra, laporan kinerja, laporan SPIP, laporan pertanggung jawaban, laporan PNBP, weekly report, laporan program dan kegiatan, laporan keuangan, laporan BMN, laporan PM SAKIP, laporan barang KPA dan laporan PIPK Tahun 2025.

Tabel 12. Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Bitung (%)

Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan									
IK 4. Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Bitung (%)									
Realisasi Capaian				2025				Rencana Kegiatan BPPP Bitung 2025-2029	
2021 - 2024				Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024 - 2025	Target 2025	% Capaian Thd Target 2025
2021	2022	2023	2024	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

Berdasarkan data pada Tabel 12, BPPP Bitung menunjukkan stabilitas kinerja yang sangat baik dalam memberikan layanan dukungan manajemen internal. Selama periode lima tahun terakhir, terhitung mulai tahun 2021 hingga 2024, realisasi capaian layanan ini secara konsisten bertahan pada angka optimal sebesar 100,00%. Tren positif tersebut berlanjut hingga tahun 2025, di mana satuan kerja berhasil memenuhi target yang ditetapkan sebesar 100,00% dengan realisasi yang juga mencapai 100%. Meskipun tidak tercatat fluktuasi persentase antara tahun 2024 dan 2025 karena capaian telah mencapai target, kondisi ini membuktikan kemampuan BPPP Bitung dalam mempertahankan standar pelayanan prima secara berkelanjutan dan akuntabel selaras dengan Rencana Kegiatan 2025–2029.

Keberhasilan pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) ini didukung oleh koordinasi yang solid serta kerja sama yang sinergis dari seluruh sumber daya manusia (SDM) di lingkungan BPPP Bitung. Secara teknis, keberhasilan ini direfleksikan melalui kualitas penyajian laporan, kelengkapan data dukung, serta ketepatan waktu dalam melakukan penginputan data capaian. Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian indikator ini terwujud melalui dukungan SDM yang kompeten di bidangnya, yang telah diperkuat melalui berbagai bimbingan teknis maupun diklat, serta didukung oleh optimalisasi sistem pelaporan berbasis aplikasi. Mengingat realisasi kinerja IKU ini belum dapat diperbandingkan dengan standar nasional karena keterbatasan institusi pembanding yang setara, maka evaluasi dilakukan melalui studi komparasi dengan unit kerja di lingkup BPPSDMKP

sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 13. Perbandingan realisasi Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Bitung (%) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP

No	Nama Satker	Target Capaian Satker (%)	Realisasi Capain Satker (%)	Persentase Realisasi Capaian Satker (%)
1	BPPP Medan	100,00	100,00	100,00
2	BPPP Tegal	100,00	100,00	100,00
3	BPPP Banyuwangi	100,00	100,00	100,00
4	BPPP Ambon	100,00	100,00	100,00
5	BPPP Bitung	100,00	100,00	100,00

Berdasarkan data pada Tabel 13, performa BPPP Bitung menunjukkan tingkat kompetitivitas yang tinggi jika dibandingkan dengan satuan kerja lain di lingkup BPPSDMKP. Dengan realisasi sebesar 100,00%, capaian BPPP Bitung setara dengan BPPP Tegal, BPPP Banyuwangi, BPPP medan dan BPPP Ambon yang juga mencatatkan angka realisasi serta persentase capaian sebesar 100,00%. Secara keseluruhan, data ini menegaskan bahwa BPPP Bitung telah memenuhi target rencana kegiatan tahun 2025 dengan tingkat efektivitas layanan internal yang optimal dan akuntabel.

Guna menjaga konsistensi pencapaian indikator kinerja tersebut pada tahun 2025, BPPP Bitung mengimplementasikan beberapa langkah strategis, yang meliputi pelaksanaan rapat monitoring dan evaluasi secara berkala. Kegiatan ini dilakukan secara mingguan untuk memastikan progres capaian kinerja tetap sesuai rencana, serta secara triwulanan untuk mengevaluasi hasil kerja dan merumuskan langkah tindak lanjut yang diperlukan. Selain itu, dilakukan pemantauan intensif terhadap penyelesaian dokumen untuk memastikan seluruh target terpenuhi tepat waktu, sekaligus mengidentifikasi dan mengatasi kendala administratif secara efektif. Seluruh proses ini diakhiri dengan penyusunan laporan dukungan manajerial sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban publik. Rangkaian langkah strategis ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional serta menjamin pencapaian indikator kinerja yang maksimal di lingkungan BPPP Bitung sepanjang tahun 2025.

IKSK.02.02 Indeks Profesionalitas ASN BPPP Bitung (indeks)

Profesionalitas adalah kualitas sikap anggota suatu profesi serta derajat pengetahuan dan keahlian yang dimiliki untuk dapat melakukan tugas pekerjaan. IKU Indeks Profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Tabel 14. Indeks Profesionalitas ASN BPPP Bitung (indeks)

Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan									
IK 5. Indeks Profesionalitas ASN BPPP Bitung (Indeks)									
Realisasi Capaian 2021 - 2024				2025				Rencana Kegiatan BPPP Bitung 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024 - 2025	Target 2025	% Capaian Thd Target 2025
77,67	76,61	83,14	82,99	83,00	83,82	100,99	1,01	83,00	100,99

Berdasarkan catatan historis periode 2021 hingga 2024, BPPP Bitung menunjukkan tren perkembangan yang positif dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Indeks Profesionalitas ASN. Indeks tersebut mengalami fluktuasi yang cenderung meningkat, dimulai dari angka 77,67 pada tahun 2021, terkoreksi menjadi 76,61 pada tahun 2022, kemudian meningkat signifikan menjadi 83,14 pada tahun 2023, dan berada pada posisi 82,99 pada tahun 2024. Memasuki tahun 2025, BPPP Bitung menetapkan target indeks sebesar 83 dan berhasil melampauinya dengan realisasi mencapai 83,82. Capaian ini menghasilkan persentase kinerja sebesar 100,99% terhadap target tahunan, sekaligus mencatatkan kenaikan sebesar 1,01% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Apabila dikorelasikan dengan Rencana Kegiatan BPPP Bitung 2025–2029, realisasi tahun 2025 ini telah memenuhi target rencana strategis, yang merefleksikan komitmen kuat satuan kerja dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel melalui penguatan profesionalitas ASN. Mengingat realisasi kinerja IKU ini belum dapat diperbandingkan dengan standar nasional karena keterbatasan institusi pembanding yang setara, maka evaluasi dilakukan melalui studi komparasi dengan unit kerja di lingkup BPPSDMKP sebagaimana tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 15. Perbandingan realisasi Indeks Profesionalitas ASN BPPP Bitung (indeks) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP

No	Nama Satker	Target Capaian Satker (%)	Realisasi Capaian Satker (%)	Persentase Realisasi Capaian Satker (%)
1	BPPP Medan	83	85,17	102,61
2	BPPP Tegal	83	85,04	102,46
3	BPPP Banyuwangi	83	85,43	102,93
4	BPPP Ambon	83	84,19	101,43
5	BPPP Bitung	83	83,82	100,99

Berdasarkan data perbandingan antar-satuan kerja di lingkup BPPSDMKP, seluruh unit kerja menunjukkan hasil yang sangat positif dengan keberhasilan melampaui target indeks profesionalitas yang telah ditetapkan sebesar 83,00. Dalam perbandingan ini, BPPP Banyuwangi mencatatkan realisasi tertinggi sebesar 85,43 (capaian 102,93%), diikuti oleh BPPP Medan dengan realisasi 85,17 (102,61%), BPPP Tegal dengan nilai 85,04 (102,46%), dan BPPP Ambon sebesar 84,19 (101,43%). Sementara itu, BPPP Bitung mencatatkan realisasi sebesar 83,82, yang berarti telah memenuhi target dengan persentase capaian

sebesar 100,99%. Secara kolektif, data ini merefleksikan komitmen yang kuat dari seluruh satuan kerja dalam meningkatkan kualitas dan profesionalitas sumber daya manusia di lingkungan masing-masing. Keberhasilan pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) ini didorong oleh tingginya antusiasme serta motivasi pegawai BPPP Bitung dalam melakukan pengembangan kompetensi mandiri melalui partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan pelatihan, seminar, maupun lokakarya daring. Langkah strategis yang dilakukan untuk menunjang pencapaian target tersebut adalah melalui upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan. Fokus pengembangan ini bertujuan untuk memastikan setiap personel memiliki kualifikasi yang relevan guna mendukung optimalisasi pelayanan publik di lingkungan BPPP Bitung.

IKSK.02.03 Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Bitung (%)

Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Bitung merupakan rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP dari hasil audit, revidu dan evaluasi yang telah diterbitkan (selama periode pengukuran) ditindaklanjuti secara tuntas oleh seluruh mitra kerja yang menjadi obyek pengawasan. Capaian IKU Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Bitung dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 16. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Bitung (%)

Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan									
IK 6. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Bitung (%)									
Realisasi Capaian 2021 - 2024				2025				Rencana Kegiatan BPPP Bitung 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	% Penurunan 2024 - 2025	Target 2025	% Capaian Thd Target 2025
-	50	100	100	85	85	100,00	15,00	85	100,00

Berdasarkan data pada Tabel 16, BPPP Bitung menunjukkan komitmen yang kuat dalam menindaklanjuti hasil pengawasan guna mendorong perbaikan kinerja organisasi secara berkelanjutan. Merujuk pada tren realisasi periode 2021–2024, indikator ini mengalami peningkatan yang signifikan; dimulai dari belum adanya target pada tahun 2021 (IKU baru Tahun 2021), meningkat menjadi 50,00% pada 2022, hingga mencapai angka optimal 100,00% secara konsisten pada tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2025, BPPP Bitung menetapkan target sebesar 85,00% dan berhasil merealisasikannya secara tepat sasaran, sehingga persentase capaian kinerjanya mencapai 100,00%. Meskipun terdapat penurunan sebesar 15% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, capaian ini tetap memenuhi target yang ditetapkan dalam Rencana Kegiatan BPPP Bitung 2025–

2029 dengan tingkat efektivitas sebesar 100,00%. Hal tersebut mencerminkan bahwa tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan BPPP Bitung tetap terjaga selaras dengan perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Mengingat realisasi kinerja IKU ini belum dapat diperbandingkan dengan standar nasional karena keterbatasan institusi pembanding yang setara, maka evaluasi dilakukan melalui studi komparasi dengan unit kerja di lingkup BPPSDMKP sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 17. Perbandingan realisasi Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Bitung (%) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP

No	Nama Satker	Target Capaian Satker (%)	Realisasi Capaian Satker (%)	Persentase Realisasi Capaian Satker (%)
1	BPPP Medan	85,00	85,00	100,00
2	BPPP Tegal	85,00	100,00	117,65
3	BPPP Banyuwangi	85,00	85,00	100,00
4	BPPP Ambon	85,00	85,00	100,00
5	BPPP Bitung	85,00	85,00	100,00

Berdasarkan data perbandingan satuan kerja BPPP lingkup BPPSDMKP, seluruh unit kerja menunjukkan komitmen yang sangat tinggi dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, di mana setiap satuan kerja berhasil memenuhi atau melampaui target minimal yang ditetapkan sebesar 85,00%. BPPP Tegal mencatatkan performa paling unggul dengan realisasi mencapai 100,00%, yang menghasilkan persentase capaian tertinggi sebesar 117,65%. Sementara itu, empat satuan kerja lainnya, yaitu BPPP Medan, BPPP Banyuwangi, BPPP Ambon, dan BPPP Bitung, menunjukkan konsistensi kinerja yang seragam dengan realisasi sebesar 85,00%, sehingga masing-masing mencapai tingkat pemenuhan target sebesar 100,00%. Data ini merefleksikan adanya keseriusan kolektif di lingkungan BPPSDMKP dalam mendayagunakan hasil pengawasan sebagai instrumen perbaikan kinerja organisasi secara akuntabel.

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait pemanfaatan rekomendasi hasil pengawasan ini didukung secara teknis oleh ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penggunaan aplikasi SIDAK KKP. Sistem ini berperan krusial dalam memastikan seluruh rekomendasi hasil pengawasan dapat ditindaklanjuti secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Sebagai langkah penguatan, BPPP Bitung melaksanakan kegiatan strategis berupa peningkatan kompetensi bagi operator pengelola aplikasi SIDAK KKP. Melalui penguatan kapasitas tersebut, pengelolaan dan penginputan data dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga progres capaian IKU tahunan dapat terpantau secara akurat dan berkelanjutan.

IKSK.02.04 Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Bitung (nilai)

Penilaian Mandiri SAKIP Satker dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Satker. Nilai PM SAKIP Satker adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri dari Tim SAKIP BPPSDMKP.

Tabel 18. Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Bitung (nilai)

Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan									
IK 7. Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Bitung (nilai)									
Realisasi Capaian 2021 - 2024				2025				Rencana Kegiatan BPPP Bitung 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024 - 2025	Target 2025	% Capaian Thd Target 2025
-	-	82,25	83,15	80,00	83,15	103,94	0,00	81,00	102,65

Berdasarkan data historis, BPPP Bitung menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang tercermin dari tren positif pada nilai Penilaian Mandiri SAKIP. Setelah indikator ini belum tersedia target pada tahun 2021 dan 2022, perolehan nilai SAKIP mulai tercatat secara signifikan pada tahun 2023 sebesar 82,25 dan meningkat menjadi 83,15 pada tahun 2024. Memasuki tahun 2025, BPPP Bitung menetapkan target sebesar 80,00 dan berhasil mencatatkan realisasi yang melampaui sasaran tersebut dengan nilai 83,15, sehingga menghasilkan persentase kinerja sebesar 103,94%. Meskipun tidak terdapat fluktuasi nilai dibandingkan tahun sebelumnya, capaian ini menunjukkan stabilitas performa yang sangat baik. Jika dikorelasikan dengan Rencana Kegiatan BPPP Bitung 2025–2029 yang menetapkan target sebesar 81,00, maka realisasi saat ini telah memenuhi target perencanaan strategis tersebut dengan tingkat efektivitas sebesar 102,65%. Hal ini menegaskan bahwa BPPP Bitung secara konsisten mampu menjaga tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Mengingat realisasi kinerja IKU ini belum dapat diperbandingkan dengan standar nasional karena keterbatasan institusi pembanding yang setara, maka evaluasi dilakukan melalui studi komparasi dengan unit kerja di lingkup BPPSDMKP sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 19. Perbandingan realisasi Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Bitung (nilai) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP

No	Nama Satker	Target Capaian Satker (nilai)	Realisasi Capain Satker (nilai)	Persentase Realisasi Capaian Satker (%)
1	BPPP Medan	80	85,00	106,25
2	BPPP Tegal	80	83,50	104,38
3	BPPP Banyuwangi	80	83,15	103,94
4	BPPP Ambon	80	83,50	104,38
5	BPPP Bitung	80	83,15	103,94

Berdasarkan data perbandingan di lingkup BPPSDMKP, seluruh satuan kerja menunjukkan performa yang sangat baik dalam aspek akuntabilitas kinerja dengan keberhasilan melampaui target nilai SAKIP yang ditetapkan sebesar 80,00. BPPP Medan mencatatkan nilai tertinggi sebesar 85,00 dengan persentase realisasi 106,25%, diikuti oleh BPPP Tegal dan BPPP Ambon yang masing-masing memperoleh nilai 83,50 dengan tingkat capaian 104,38%. Sementara itu, BPPP Bitung bersama BPPP Banyuwangi mencatatkan nilai sebesar 83,15 dengan persentase realisasi target mencapai 103,94%. Secara keseluruhan, data ini menegaskan bahwa BPPP Bitung memiliki tingkat akuntabilitas yang stabil serta kompetitif di antara unit kerja lainnya.

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ini didukung oleh ketersediaan dokumen perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja yang telah tersusun secara sistematis selama lima tahun terakhir. Faktor penunjang utama dalam penguatan akuntabilitas ini adalah pemanfaatan aplikasi Kinerjaku yang menyediakan fitur penilaian mandiri SAKIP, sehingga mempermudah satuan kerja dalam menyusun dokumen penilaian secara lebih efektif dan efisien. Guna mendukung keberlanjutan capaian pada tahun 2025, BPPP Bitung telah menetapkan langkah-langkah strategis, meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui Pelatihan SAKIP di BDA Sukamandi, penyusunan dokumen penilaian mandiri secara periodik sejak awal tahun, serta digitalisasi dokumen melalui penyimpanan berbasis *cloud storage* untuk menjamin aksesibilitas dan pengorganisasian data yang lebih baik. Implementasi SAKIP yang komprehensif ini merefleksikan kematangan perencanaan, sistem pelaporan yang terstruktur, serta optimalisasi teknologi dalam proses evaluasi kinerja di lingkungan BPPP Bitung.

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ini didukung oleh ketersediaan dokumen perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja yang telah tersusun secara sistematis selama lima tahun terakhir. Faktor penunjang utama dalam penguatan akuntabilitas ini adalah pemanfaatan aplikasi Kinerjaku yang menyediakan fitur penilaian mandiri SAKIP, sehingga mempermudah satuan kerja dalam menyusun dokumen penilaian secara lebih efektif dan efisien. Guna mendukung keberlanjutan capaian pada tahun 2025, BPPP Bitung telah menetapkan langkah-langkah strategis,

meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui Pelatihan SAKIP di BDA Sukamandi, penyusunan dokumen penilaian mandiri secara periodik sejak awal tahun, serta digitalisasi dokumen melalui penyimpanan berbasis *cloud storage* untuk menjamin aksesibilitas dan pengorganisasian data yang lebih baik. Implementasi SAKIP yang komprehensif ini merefleksikan kematangan perencanaan, sistem pelaporan yang terstruktur, serta optimalisasi teknologi dalam proses evaluasi kinerja di lingkungan BPPP Bitung.

IKSK.02.05. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Bitung (%)

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, karena BMN merupakan aset negara yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian/lembaga. Tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN mencerminkan sejauh mana satuan kerja telah melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan secara tertib, akuntabel, dan berkelanjutan (Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, serta ketentuan pengelolaan BMN, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018 tentang Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan). Secara umum, tingkat kepatuhan pengelolaan BMN dinilai berdasarkan kesesuaian pelaksanaan pengelolaan BMN dengan regulasi yang berlaku, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, penatausahaan, pengamanan dan pemeliharaan, hingga penghapusan dan pelaporan BMN. Kepatuhan juga tercermin dari keterpaduan antara kondisi fisik BMN dengan data administrasi yang tercatat dalam sistem pengelolaan aset pemerintah.

Tabel 20. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Bitung (%)

Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan									
IK 8. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Bitung (%)									
Realisasi Capaian 2021 - 2024				2025				Rencana Kegiatan BPPP Bitung 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024 - 2025	Target 2025	% Capaian Thd Target 2025
-	-	-	-	80,00	95,00	118,75	95,00	80,00	118,75

Berdasarkan data pada Tabel 20, BPPP Bitung menunjukkan keberhasilan yang signifikan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel, khususnya pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Meskipun indikator ini merupakan parameter baru yang diimplementasikan pada tahun 2025 sehingga tidak terdapat catatan historis pada periode 2021 hingga 2024, BPPP Bitung berhasil melampaui target tahun berjalan yang ditetapkan sebesar 80,00% dengan realisasi mencapai 95,00%. Capaian tersebut mencerminkan

tingkat efektivitas sebesar 118,75%, yang mengindikasikan bahwa performa instansi berada di atas ekspektasi yang telah ditetapkan. Jika merujuk pada periode transisi dari tahun sebelumnya, perolehan ini menandai titik awal pertumbuhan yang sangat positif dalam manajemen aset. Pencapaian ini (118,75%) selaras dengan target tahun 2025 pada Rencana Kegiatan BPPP Bitung periode 2025–2029, di mana optimalisasi pengelolaan aset negara diharapkan dapat dipertahankan secara konsisten guna mendukung akuntabilitas organisasi di masa depan. Mengingat realisasi kinerja IKU ini belum dapat diperbandingkan dengan standar nasional karena keterbatasan institusi pembanding yang setara, maka evaluasi dilakukan melalui studi komparasi dengan unit kerja di lingkup BPPSDMKP sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 21. Perbandingan realisasi Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Bitung (%) dengan BPPP lingkup BPPSDMKP

No	Nama Satker	Target Capaian Satker (%)	Realisasi Capain Satker (%)	Persentase Realisasi Capaian Satker (%)
1	BPPP Medan	80	97,50	120,00
2	BPPP Tegal	80	97,50	120,00
3	BPPP Banyuwangi	80	100,00	120,00
4	BPPP Ambon	80	80,00	100,00
5	BPPP Bitung	80	95,00	118,75

Berdasarkan data pada Tabel 21, tingkat kepatuhan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkup BPPSDMKP menunjukkan performa yang sangat positif, di mana seluruh satuan kerja berhasil memenuhi atau melampaui target yang ditetapkan sebesar 80,00%. BPPP Banyuwangi mencatatkan realisasi optimal sebesar 100,00%, yang menghasilkan persentase capaian sebesar 120,00%. Hasil yang signifikan juga dicapai oleh BPPP Medan dan BPPP Tegal dengan nilai realisasi masing-masing sebesar 97,50% atau setara dengan tingkat capaian 120,00%. Sementara itu, BPPP Bitung menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan nilai realisasi 95,00% atau mencapai 118,75% dari target, disusul oleh BPPP Ambon yang berhasil memenuhi target dengan realisasi 80,00% dan persentase capaian sebesar 100,00%. Secara keseluruhan, data ini merefleksikan komitmen tinggi dari seluruh satuan kerja dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan aset negara di lingkungan BPPSDMKP.

Keberhasilan dalam meningkatkan tingkat kepatuhan ini didorong oleh berbagai upaya strategis, meliputi peningkatan kompetensi pengelola BMN melalui pembinaan internal, koordinasi, serta pendampingan dalam penatausahaan aset secara berkelanjutan. Selain itu, penguatan pengendalian internal dalam pengawasan penggunaan dan pemeliharaan BMN menjadi faktor krusial guna memastikan kesesuaian antara kondisi fisik dengan administrasi. Capaian BPPP Bitung khususnya, didukung oleh ketersediaan regulasi yang jelas, dukungan pimpinan dalam mendorong tertib administrasi, serta optimalisasi sistem informasi penatausahaan BMN yang terintegrasi.

Sebagai langkah nyata dalam mempertahankan kinerja tersebut, BPPP Bitung melaksanakan kegiatan strategis berupa inventarisasi berkala, pembaruan data mutasi secara tepat waktu, serta evaluasi menyeluruh terhadap kondisi aset sebagai dasar pengambilan kebijakan pemeliharaan, pemanfaatan, maupun penghapusan BMN secara akuntabel.

IKSK.02.06. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Bitung (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SIRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Tabel 22. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Bitung (%)

Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan									
IK 9. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Bitung (%)									
Realisasi Capaian 2021 - 2024				2025				Rencana Kegiatan BPPP Bitung 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024 - 2025	Target 2025	% Capaian Thd Target 2025
-	-	-	-	80	100	120,00	120,00	80	120,00

Berdasarkan data pada Tabel 22, capaian kinerja BPPP Bitung pada indikator tingkat pengisian Rencana Umum Pengadaan (RUP) dalam sistem SIRUP tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dengan tingkat efektivitas yang melampaui sasaran. Dari target yang ditetapkan sebesar 80,00%, BPPP Bitung berhasil mencatatkan realisasi optimal sebesar 100,00%. Keberhasilan tersebut menghasilkan persentase capaian terhadap target sebesar 120,00%, yang sekaligus menandai performa awal yang sangat positif mengingat indikator ini merupakan parameter kinerja baru yang diimplementasikan pada tahun 2025. Pencapaian ini menegaskan komitmen BPPP Bitung dalam menjunjung prinsip transparansi serta akuntabilitas pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu, realisasi ini (100,00) telah selaras dan melebihi target (80,00%) yang ditetapkan tahun 2025 dibandingkan pada Rencana Kegiatan BPPP Bitung

periode 2025–2029. Mengingat realisasi kinerja indikator ini belum dapat diperbandingkan dengan standar nasional karena keterbatasan institusi pembanding yang setara, maka evaluasi dilakukan melalui studi komparasi dengan unit kerja di lingkup BPPSDMKP sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 23. Perbandingan realisasi Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Bitung (%) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP

No	Nama Satker	Target Capaian Satker (%)	Realisasi Capaian Satker (%)	Persentase Realisasi Capaian Satker (%)
1	BPPP Medan	80,00	100,00	120,00
2	BPPP Tegal	80,00	100,00	120,00
3	BPPP Banyuwangi	80,00	100,00	120,00
4	BPPP Ambon	80,00	100,00	120,00
5	BPPP Bitung	80,00	100,00	120,00

Berdasarkan data pada Tabel 23, kinerja seluruh satuan kerja di lingkup BPPSDMKP menunjukkan hasil yang sangat signifikan dan seragam pada indikator pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui sistem SIRUP. Seluruh unit kerja, yang meliputi BPPP Medan, BPPP Tegal, BPPP Banyuwangi, BPPP Ambon, dan BPPP Bitung, berhasil mencapai tingkat pengumuman optimal sebesar 100%. Dengan target capaian yang ditetapkan sebesar 80,00%, seluruh satuan kerja secara konsisten mencatatkan persentase realisasi sebesar 120,00%. Capaian ini menegaskan kepatuhan penuh serta transparansi yang tinggi dari seluruh BPPP dalam proses perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Secara keseluruhan, hasil tersebut merefleksikan efektivitas tata kelola administrasi dan kedisiplinan terhadap regulasi pengadaan, yang menjadi indikator positif bagi perencanaan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan.

Keberhasilan BPPP Bitung dalam mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) ini didorong oleh komitmen kuat dari pimpinan serta tim pengadaan dalam menyusun dan mengumumkan RUP secara tepat waktu, selaras dengan regulasi yang ditetapkan oleh LKPP. Selain itu, faktor pendukung lainnya mencakup penguasaan teknis dalam optimalisasi penggunaan sistem SIRUP serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menjamin seluruh tahapan berjalan sesuai target. Sebagai langkah strategis, BPPP Bitung menerapkan sistem pengendalian internal yang ketat, melakukan pemantauan progres input data secara intensif, serta memberikan evaluasi dan umpan balik yang berkelanjutan guna memastikan akuntabilitas proses pengadaan tetap terjaga.

IKSK.02.07 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai)

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja

pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain ; (a) Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ; (b) Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$; (c) Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau (d) Kurang, apabila nilai IKPA < 70 .

Tabel 24. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai)

Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan									
IK 10. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai)									
Realisasi Capaian 2021 - 2024				2025				Rencana Kegiatan BPPP Bitung 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	% Penurunan 2024 - 2025	Target 2025	% Capaian Thd Target 2025
97,88	97,91	95,96	100,00	92,00	97,60	106,09	2,40	92,00	106,09

Berdasarkan data tabel yang disajikan, capaian indikator IK 10 mengenai Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Bitung pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat positif dan melampaui target yang telah ditetapkan. Secara historis, realisasi kinerja BPPP Bitung berfluktuasi pada level yang tinggi, yakni sebesar 97,88 pada tahun 2021, 97,91 pada tahun 2022, 95,96 pada tahun 2023, hingga mencapai nilai sempurna sebesar 100,00 pada tahun 2024. Memasuki tahun 2025, BPPP Bitung menetapkan target kinerja yang realistis sebesar 92,00, dan berhasil merealisasikannya pada angka 97,60.

Pencapaian tersebut menghasilkan persentase efektivitas terhadap target tahun 2025 sebesar 106,09%, yang menegaskan bahwa pelaksanaan anggaran dilakukan secara optimal melampaui ekspektasi perencanaan. Meskipun terdapat persentase penurunan sebesar 2,40% jika dibandingkan dengan performa tahun 2024, nilai realisasi 97,60 ini tetap mencerminkan kualitas tata kelola keuangan yang sangat baik dan akuntabel. Keberhasilan ini juga sejalan dengan parameter keberhasilan tahun 2025 dalam Rencana Kegiatan BPPP Bitung periode 2025-2029, di mana capaian terhadap target tahunan tetap konsisten berada di atas angka 100%. Secara keseluruhan, data ini membuktikan komitmen BPPP Bitung dalam menjaga efektivitas tata kelola pemerintahan di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. Mengingat realisasi kinerja IKU ini belum dapat diperbandingkan dengan standar nasional karena keterbatasan institusi pembanding yang setara, maka evaluasi dilakukan melalui studi komparasi dengan unit kerja di lingkup BPPSDMKP sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 25. Perbandingan realisasi Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP

No	Nama Satker	Target Capaian Satker (nilai)	Realisasi Capain Satker (nilai)	Persentase Realisasi Capaian Satker (%)
1	BPPP Medan	92,00	100,00	108,69
2	BPPP Tegal	-	-	-
3	BPPP Banyuwangi	92,00	99,69	108,36
4	BPPP Ambon	92,00	97,81	106,31
5	BPPP Bitung	92,00	97,60	106,09

Berdasarkan data capaian secara umum, Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada satuan kerja di lingkungan BPPSDMKP menunjukkan performa yang sangat solid dan berhasil melampaui target yang ditetapkan. Dengan target indeks sebesar 92, seluruh satuan kerja mencatatkan realisasi yang melampaui sasaran tersebut sehingga menghasilkan persentase capaian di atas 100,00%. BPPP Medan mencatatkan kinerja tertinggi dengan nilai realisasi optimal sebesar 100,00 (108,69%), diikuti oleh BPPP Banyuwangi dengan realisasi 99,69 (108,36%) serta BPPP Ambon dengan nilai 97,81 (106,31%). Sementara itu, BPPP Bitung mencatatkan nilai realisasi sebesar 97,60 dengan tingkat efektivitas terhadap target sebesar 106,09%. Perlu dicatat bahwa pada periode ini BPPP Tegal tidak memiliki parameter IKU IKPA. Secara keseluruhan, hasil ini merefleksikan kedisiplinan dan efektivitas yang tinggi dalam pengelolaan anggaran di seluruh unit kerja pelatihan dan penyuluhan perikanan.

Keberhasilan pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) ini didukung oleh sinergi dan kerja sama tim yang baik, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan hasil realisasi anggaran. Selain itu, faktor penunjang strategis lainnya adalah komunikasi yang efektif serta arahan pimpinan yang terukur melalui rapat monitoring dan evaluasi secara berkala. Koordinasi yang intensif, baik di tingkat sub-bagian maupun antar-tim kerja, menjadi kunci dalam memastikan setiap tahapan pengelolaan anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan.

IKSK.02.08 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 dibagi dalam beberapa tingkatan antara lain tingkat Kementerian Negara/Lembaga, tingkat unit Eselon I, dan tingkat Satuan Kerja (satker). Perhitungan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Tingkat Satker Nilai Kinerja Anggaran tingkat Satker dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara capaian setiap indikator dengan bobot masing masing indikator. Adapun bobot setiap indikator Kinerja Anggaran Tingkat Satker sebagai berikut:

Variabel	Indikator	Bobot
Efektivitas 75	1. Capaian RO	75
Efisiensi 25	1. Penggunaan SBK	10
	2. Efisiensi SBK	15

Perhitungan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran tingkat Satker menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{NKA Satker} = (\text{CRO} \times \text{WCRO}) + (\text{Penggunaan SBK} \times \text{WPenggunaanSBK}) + (\text{NEAlokasi} \times \text{WEAlokasi})$$

Keterangan :

NKA Satker : Nilai Kinerja Anggaran Satker

CRO : Capaian RO

Penggunaan_{SBK} : Penggunaan SBK

NE_{Alokasi} : Nilai Efisiensi Alokasi

W_{CRO} : Bobot Capaian RO

WPenggunaanSBK : Bobot Penggunaan SBK

WE_{Alokasi} : Bobot Efisiensi Alokasi

Contoh: Nilai Kinerja Anggaran Satker di atas adalah sebagai berikut:

$$\text{NKA Satker} = (\text{CRO} \times \text{W}_{\text{CRO}}) + (\text{PenggunaanSBK} \times \text{WPenggunaanSBK}) + (\text{NE}_{\text{Alokasi}} \times \text{WE}_{\text{Alokasi}})$$

$$\text{NKA Satker} = (94,8 \times 75\%) + (70 \times 10\%) + (47,4 \times 15\%)$$

$$\text{NKA Satker} = 85,21 \text{ (Kategori Baik)}$$

Tabel 26. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai)

Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan									
IK 11. Nilai Kinerja Anggaran BPPP Bitung (nilai)									
Realisasi Capaian 2021 - 2024				2025				Rencana Kegiatan BPPP Bitung 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024 - 2025	Target 2025	% Capaian Thd Target 2025
-	-	-	100,00	71,50	100,00	120,00	0,00	71,50	120,00

Realisasi indikator Nilai Kinerja Anggaran BPPP Bitung (IK 11) pada tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat optimal dengan perolehan nilai maksimal sebesar 100,00. Mengacu pada target yang ditetapkan sebesar 71,50, BPPP Bitung berhasil mencapai tingkat efektivitas sebesar 120,00%, yang mengindikasikan bahwa pengelolaan anggaran telah melampaui ekspektasi perencanaan secara signifikan. Apabila ditinjau dari aspek keberlanjutan, BPPP Bitung berhasil mempertahankan stabilitas kinerja pada level tertinggi sejak indikator ini diimplementasikan secara efektif pada tahun 2024 dengan nilai realisasi yang sama, yaitu 100,00. Hal ini tercermin dari tidak ada kenaikan maupun penurunan persentase tahun 2024-2025 yang tercatat sebesar 0,00%, yang dalam konteks ini menunjukkan konsistensi dalam mempertahankan standar mutu di titik puncak. Hasil tersebut sekaligus selaras dengan Rencana Kegiatan BPPP Bitung 2025-

2029, di mana capaian terhadap target tahunan tetap berada pada angka 120,00%, mempertegas komitmen instansi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di bidang pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. Mengingat realisasi kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) ini belum dapat diperbandingkan dengan standar nasional karena keterbatasan institusi pembanding yang setara, maka evaluasi dilakukan melalui studi komparasi dengan unit kerja di lingkup BPPSDMKP sebagaimana tersaji dalam analisis perbandingan selanjutnya.

Tabel 27. Perbandingan realisasi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Bitung dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP

No	Nama Satker	Target Capaian Satker (nilai)	Realisasi Capaian Satker (nilai)	Persentase Realisasi Capaian Satker (%)
1	BPPP Medan	71,50	100,00	120,00
2	BPPP Tegal	71,50	100,00	120,00
3	BPPP Banyuwangi	71,50	100,00	120,00
4	BPPP Ambon	71,50	100,00	120,00
5	BPPP Bitung	71,50	100,00	120,00

Berdasarkan data pada Tabel 27, seluruh satuan kerja di lingkup BPPSDMKP menunjukkan performa perencanaan anggaran yang sangat optimal pada tahun berjalan, di mana mayoritas unit kerja berhasil mencapai nilai maksimal. Dengan target yang ditetapkan sebesar 71,50, kelima satuan kerja yang meliputi BPPP Medan, BPPP Tegal, BPPP Banyuwangi, BPPP Ambon, dan BPPP Bitung berhasil merealisasikan nilai optimal sebesar 100,00. Keberhasilan tersebut membawa seluruh satuan kerja secara seragam mencapai persentase realisasi sebesar 120,00% terhadap target yang ditentukan. Hasil ini mencerminkan tingkat akurasi serta kualitas perencanaan anggaran yang sangat tinggi di seluruh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan, yang menjadi fondasi kuat bagi efektivitas pelaksanaan program kerja organisasi.

Faktor utama yang menunjang keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah optimalisasi penggunaan aplikasi SMART DJA sebagai instrumen pengukuran nilai kinerja anggaran. Selain itu, pencapaian ini didukung oleh perencanaan yang matang, koordinasi lintas unit kerja yang efektif, serta komitmen kolektif dalam mengimplementasikan program secara optimal. Guna memastikan konsistensi pencapaian target IKU pada tahun 2025, BPPP Bitung secara rutin menyelenggarakan rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja setiap triwulan. Melalui forum tersebut, dilakukan pemantauan intensif terhadap progres seluruh indikator tahunan untuk menjamin adanya perkembangan signifikan yang selaras dengan target. Upaya ini diperkuat dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data, serta penguatan sinergi dengan para pemangku kepentingan terkait.

Sasaran Kegiatan 3 Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

IKSK.03.01. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh BPPP Bitung (kelompok)

Sektor kelautan dan perikanan merupakan pilar utama ekonomi nasional yang menuntut pengelolaan profesional dan berkelanjutan. Di tengah dinamika industri global, BPPP Bitung hadir sebagai akselerator transformasi bagi masyarakat pesisir. Melalui fungsi penyuluhan yang intensif, BPPP Bitung mendampingi para Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung agar mampu bertransformasi dari cara-cara tradisional menuju tata kelola yang modern, efisien, dan berdaya saing tinggi. Penyuluhan yang dilakukan oleh BPPP Bitung tidak hanya menyasar individu, tetapi difokuskan pada penguatan kelembagaan melalui pembentukan dan pembinaan kelompok. Kelompok-kelompok ini menjadi wadah kolektif untuk bertukar ilmu, memperkuat posisi tawar di pasar, serta mempermudah akses terhadap teknologi dan permodalan. Melalui pendampingan yang berkelanjutan, BPPP Bitung berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap kelompok yang disuluh tidak hanya sekadar bertahan, tetapi mampu naik kelas menjadi entitas bisnis yang mandiri. Dengan membekali mereka melalui literasi digital, wawasan konservasi, dan inovasi teknologi tepat guna, BPPP Bitung optimis dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan yang selaras dengan prinsip Ekonomi Biru.

Tabel 28. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh BPPP Bitung (kelompok)

Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan									
IK 1. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Bitung (kelompok)									
Realisasi Capaian 2021 - 2024				2025				Rencana Kegiatan BPPP Bitung 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	% Penurunan 2024 - 2025	Target 2025	% Capaian Thd Target 2025
3.315	3.733	3.450	3.476	2.530	3.000	120,00	13,69	2.998	100,07

Berdasarkan data pada Tabel 28, indikator jumlah kelompok pelaku usaha kelautan dan perikanan yang disuluh menunjukkan tren fluktuatif namun tetap konsisten melampaui target yang ditetapkan. Selama periode 2021 hingga 2024, volume pembinaan kelompok mencapai puncaknya pada tahun 2022 dengan total 3.733 kelompok, sebelum kemudian stabil pada angka 3.476 kelompok pada akhir tahun 2024. Memasuki tahun 2025, BPPP Bitung menetapkan target sebesar 2.530 kelompok dan berhasil merealisasikan pembinaan terhadap 3.000 kelompok. Capaian ini menghasilkan persentase efektivitas sebesar 120,00% terhadap target tahunan. Meskipun terdapat penurunan volume kerja sebesar 13,69% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya, capaian 3.000 kelompok ini telah memenuhi target Rencana Kegiatan BPPP Bitung periode 2025–2029 (target 2.998 kelompok) dengan tingkat

pemenuhan sebesar 100,07%.

Penurunan capaian pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor teknis dan kebijakan, antara lain penyesuaian persyaratan data dukung pada Manual IKU serta adanya kebijakan blokir anggaran (efisiensi). Selain itu, terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan mengharuskan adanya penyesuaian administrasi, termasuk kode registrasi dan profil kelompok sesuai pedoman terbaru. Sejak tahun 2022 dan 2023, standar validasi data telah ditingkatkan melalui pengesahan oleh Kepala Satminkal serta kelengkapan dokumen profil kelompok yang disertai lampiran SK penumbuhan atau piagam peningkatan kelas kelompok. Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan penyuluhan tetap berjalan secara efektif, meskipun diperlukan peningkatan intensitas koordinasi agar target tahunan dapat tercapai secara lebih optimal di tengah penyesuaian regulasi. Capaian ini merefleksikan komitmen berkelanjutan BPPP Bitung dalam mendukung penyelenggaraan penyuluhan guna memperkuat kapasitas kelembagaan pelaku utama dan pelaku pendukung di wilayah binaan.

Tabel 29. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh BPPP Bitung per bidang dan Gender

No	Bidang	Jumlah (kelompok)	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)
1	Budidaya	1.171	10.169	2.578
2	Pengolahan / Pemasaran	276	762	2.122
3	Penangkapan	1.530	15.947	347
4	Garam	12	90	38
5	Pokmaswas	10	114	7
6	Konservasi	1	16	0
	Jumlah	3.000	27.098	5.092

Berdasarkan data pada Tabel 29, kegiatan penyuluhan telah menjangkau total 3.000 kelompok dengan sebaran partisipan sebanyak 27.098 laki-laki dan 5.092 perempuan. Sektor penangkapan merupakan bidang dengan cakupan terluas yang melibatkan 1.530 kelompok dengan jumlah peserta laki-laki sebanyak 15.947 orang, meskipun keterlibatan perempuan pada sektor ini relatif rendah, yaitu sebanyak 347 orang. Sebaliknya, pada bidang pengolahan dan pemasaran yang terdiri dari 276 kelompok, partisipasi perempuan menunjukkan dominasi yang signifikan dengan jumlah 2.122 orang, dibandingkan laki-laki yang berjumlah 762 orang.

Selanjutnya, bidang budidaya tercatat sebagai sektor terbesar kedua dengan cakupan 1.171 kelompok yang melibatkan 10.169 laki-laki dan 2.578 perempuan. Beberapa bidang lainnya memiliki cakupan yang lebih spesifik, antara lain sektor

perguruan dengan 12 kelompok (90 laki-laki dan 38 perempuan), Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) sebanyak 10 kelompok (114 laki-laki dan 7 perempuan), serta bidang konservasi yang melibatkan 1 kelompok dengan 16 peserta laki-laki. Secara akumulatif, data ini mengindikasikan bahwa kegiatan penyuluhan masih didominasi oleh peserta laki-laki pada mayoritas sektor, kecuali pada bidang pengolahan dan pemasaran yang menjadi pusat partisipasi pelaku usaha perempuan. Mengingat realisasi kinerja IKU ini belum dapat diperbandingkan dengan standar nasional karena keterbatasan institusi pembanding yang setara, maka evaluasi dilakukan melalui studi komparasi dengan unit kerja di lingkup BPPSDMKP sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 30. Perbandingan realisasi Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh BPPP Bitung (kelompok) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP

No	Nama Satker	Target Capaian Satker (kelompok)	Realisasi Capaian Satker (kelompok)	Persentase Realisasi Capaian Satker (%)
1	BPPP Medan	3.880	4.598	118,50
2	BPPP Tegal	50	50	100,00
3	BPPP Banyuwangi	5.090	6.220	120,00
4	BPPP Ambon	2.500	2.600	104,00
5	BPPP Bitung	2.530	3.000	120,00

Berdasarkan data pada Tabel 30, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh di lingkup BPPSDMKP menunjukkan performa yang sangat efektif. Keberhasilan ini ditunjukkan oleh seluruh satuan kerja yang mampu memenuhi hingga melampaui target yang telah ditetapkan. BPPP Banyuwangi dan BPPP Bitung mencatatkan persentase realisasi tertinggi sebesar 120,00%, dengan volume masing-masing sebanyak 6.220 kelompok dan 3.000 kelompok. Capaian signifikan tersebut diikuti oleh BPPP Medan dengan realisasi sebesar 118,50% (4.598 kelompok) dan BPPP Ambon sebesar 104,00% (2.600 kelompok). Sementara itu, BPPP Tegal menunjukkan pencapaian yang akurat dengan realisasi tepat sasaran sebesar 100,00% melalui pemenuhan 50 kelompok dari target yang ditetapkan. Dengan demikian, seluruh satuan kerja di bawah naungan BPPSDMKP telah berhasil mencapai ambang batas minimum 100,00%, yang merefleksikan komitmen kolektif dalam penguatan fungsi penyuluhan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Optimalisasi kegiatan penyuluhan terus dilakukan oleh Penyuluh Perikanan serta Penyuluh Perikanan Bantu di bawah naungan BPPP Bitung melalui pendampingan intensif bagi pelaku utama dan pelaku usaha. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, kemandirian masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Faktor utama dalam keberhasilan ini adalah kompetensi teknis dan manajerial yang mumpuni dari para tenaga penyuluh, didukung oleh latar belakang pendidikan yang relevan dan

pengalaman lapangan yang luas. Selain itu, strategi penempatan penyuluh yang presisi di wilayah binaan masing-masing turut berkontribusi signifikan terhadap efektivitas program, termasuk dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrem melalui pemberdayaan masyarakat.

Hasil analisis menunjukkan adanya peningkatan motivasi yang signifikan pada pelaku utama dan pelaku usaha dalam membentuk kelembagaan kelompok. Perubahan pola pikir ke arah kemandirian usaha tanpa bergantung sepenuhnya pada bantuan pemerintah mencerminkan keberhasilan transformasi progresif sesuai tujuan penyuluhan. Guna mempertahankan dan meningkatkan performa tersebut, BPPP Bitung melaksanakan berbagai langkah strategis, antara lain penyelenggaraan rapat koordinasi rutin secara luring maupun daring sebagai forum evaluasi dan sinkronisasi data capaian IKU. Selain itu, pengembangan kapasitas SDM penyuluh dan penataan sebaran wilayah binaan berbasis potensi daerah terus dilakukan secara berkelanjutan. Melalui pendekatan pendampingan yang intensif ini, diharapkan kelompok sasaran mampu meningkatkan daya saing dan pendapatan mereka, sehingga memberikan dampak positif terhadap stabilitas ekonomi masyarakat di wilayah binaan.

IKSK.03.02 Kelompok Pelaku Usaha / Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Bitung (Kelompok)

Sektor kelautan dan perikanan merupakan pilar ekonomi krusial yang menuntut profesionalisme serta adaptabilitas tinggi dari para pelakunya. Di tengah dinamika pasar global dan perkembangan teknologi industri 4.0, peran kelompok pelaku usaha dan pelaku pendukung menjadi akselerator utama dalam menjaga kedaulatan pangan serta kesejahteraan masyarakat pesisir. BPPP Bitung, sebagai institusi yang berdedikasi dalam pengembangan sumber daya manusia, memandang bahwa keberlanjutan sektor ini tidak hanya bergantung pada kekayaan sumber daya alam, tetapi juga pada kapasitas kelembagaan kelompok tersebut. Peningkatan kelas kelompok dipandang bukan sekadar formalitas administratif, melainkan sebuah transformasi fundamental untuk mengubah kelompok dari unit sosial menjadi unit ekonomi yang mandiri dan berdaya saing.

Program peningkatan kelas kelompok yang diinisiasi oleh BPPP Bitung menysasar berbagai aspek vital guna memperkuat struktur organisasi agar lebih transparan dan akuntabel. Hal ini mencakup penguatan manajerial dan tata kelola, adopsi inovasi teknologi perikanan yang lebih efektif dan ramah lingkungan pada sisi teknis produksi, serta upaya menjembatani akses permodalan dan pasar agar kelompok mampu menjangkau skema pembiayaan formal dan rantai pasok yang lebih luas. Melalui pendampingan intensif dan penyuluhan yang terukur, BPPP Bitung berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap kelompok yang mengalami peningkatan kelas memiliki daya tahan terhadap tantangan ekonomi, sekaligus

mampu menjadi model percontohan bagi komunitas perikanan lainnya di wilayah kerja BPPP Bitung.

Tabel 31. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Bitung (kelompok)

Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan									
IK 2. Kelompok Pelaku Usaha / Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Bitung (Kelompok)									
Realisasi Capaian 2021 - 2024				2025				Rencana Kegiatan BPPP Bitung 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	% Penurunan 2024 - 2025	Target 2025	% Capaian Thd Target 2025
55,00	94,00	102,00	190,00	80,00	110,00	120,00	42,11	80,00	120,00

Berdasarkan data historis periode 2021 hingga 2024, BPPP Bitung menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam membina kelompok pelaku usaha kelautan dan perikanan. Progresivitas ini tercermin dari realisasi tahun 2021 yang dimulai dengan 55 kelompok, kemudian meningkat secara bertahap menjadi 94 kelompok pada 2022, 102 kelompok pada 2023, hingga mencapai puncaknya pada tahun 2024 dengan total 190 kelompok. Memasuki tahun berjalan 2025, BPPP Bitung menetapkan target sebesar 80 kelompok dan berhasil melampaui sasaran tersebut dengan realisasi mencapai 110 kelompok. Capaian ini merepresentasikan tingkat efektivitas sebesar 120,00% terhadap target tahunan.

Meskipun persentase capaian terhadap target 2025 berada pada level yang sangat memuaskan, terdapat penurunan sebesar 42,11% jika dibandingkan dengan angka realisasi pada tahun 2024. Namun, secara substansi dalam kerangka Rencana Kegiatan 2025–2029, performa tahun 2025 tetap dikategorikan sangat baik karena berhasil melampaui parameter efektivitas (120,00%) yang telah ditetapkan di awal periode perencanaan. Keberhasilan ini menegaskan konsistensi instansi dalam menjaga kualitas pendampingan meskipun terdapat penyesuaian target operasional. Adapun distribusi kelompok yang berhasil ditingkatkan kapasitasnya berdasarkan klasifikasi kelas dapat dicermati pada uraian berikut:

Tabel 32. Kelompok Pelaku Usaha / Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya per tingkatan kelas

No	Tingkatan Kelas	Jumlah (kelompok)
1	Pemula Ke Lanjut	43
2	Lanjut ke Madya	64
3	Madya ke Utama	3
	Total	110

Berdasarkan data pada Tabel 32, BPPP Bitung telah berhasil memfasilitasi peningkatan kelas bagi 110 kelompok pelaku usaha maupun pelaku pendukung sektor perikanan. Transformasi kelembagaan ini didominasi oleh transisi dari kelas Lanjut ke

kelas Madya yang mencakup 64 kelompok, diikuti oleh peningkatan kapasitas dari kelas Pemula ke kelas Lanjut sebanyak 43 kelompok. Selain itu, terdapat 3 kelompok yang telah mencapai level kompetensi tertinggi melalui peningkatan dari kelas Madya ke kelas Utama. Distribusi ini mengindikasikan bahwa fokus pengembangan kapasitas kelompok di wilayah binaan BPPP Bitung saat ini terkonsentrasi pada penguatan kelompok di level menengah guna mewujudkan kemandirian ekonomi yang lebih mapan.

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ini didorong oleh berbagai kegiatan strategis, di antaranya pelaksanaan pembinaan dan pendampingan secara intensif bagi para penyuluh perikanan di wilayah kerja Satminkal BPPP Bitung. Proses pendampingan tersebut dilakukan secara hibrida, baik melalui kunjungan lapangan secara langsung maupun melalui koordinasi secara daring, guna memastikan validitas data dan kualitas pembinaan di tingkat kelompok tetap terjaga. Mengingat realisasi kinerja IKU ini belum dapat diperbandingkan dengan standar nasional karena keterbatasan institusi pembanding yang setara, maka evaluasi dilakukan melalui studi komparasi dengan unit kerja di lingkup BPPSDMKP sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 33. Perbandingan realisasi Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Bitung (kelompok) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP

No	Nama Satker	Target Capaian Satker (kelompok)	Realisasi Capain Satker (kelompok)	Persentase Realisasi Capaian Satker (%)
1	BPPP Medan	174	210	120,00
2	BPPP Tegal	-	-	-
3	BPPP Banyuwangi	216	260	120,00
4	BPPP Ambon	24	30	120,00
5	BPPP Bitung	80	110	120,00

Berdasarkan data pada Tabel 33, capaian indikator Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya di lingkup BPPSDMKP menunjukkan performa yang sangat signifikan dan merata. Seluruh satuan kerja yang mengampu indikator ini berhasil mencapai tingkat efektivitas sebesar 120,00% dari target yang ditetapkan. Secara spesifik, BPPP Medan merealisasikan peningkatan kelas bagi 210 kelompok, diikuti oleh BPPP Banyuwangi sebanyak 260 kelompok, BPPP Bitung sebanyak 110 kelompok, dan BPPP Ambon sebanyak 30 kelompok. Seluruh pencapaian tersebut secara konsisten menyentuh angka 120,00% terhadap target masing-masing. Adapun BPPP Tegal tidak memiliki nilai capaian dikarenakan satuan kerja tersebut tidak mengampu IKU penyuluhan. Hasil ini menegaskan bahwa seluruh balai telah memenuhi komitmen kinerja dengan melampaui sasaran yang ditetapkan secara seragam.

Keberhasilan peningkatan kelas kelompok ini tidak hanya merupakan pencapaian kuantitatif, tetapi juga mencerminkan peran aktif pelaku utama dan pelaku usaha sebagai subjek penggerak dalam pengelolaan sumber daya serta pembentukan kelembagaan yang

mandiri. Efektivitas program ini didukung oleh keterlibatan Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Perikanan Bantu yang tersebar secara strategis di wilayah kerja masing-masing. Selain itu, kesuksesan kinerja didorong oleh sistem pelaporan yang berkelanjutan melalui rapat rutin mingguan guna sinkronisasi data IKU dan pemenuhan standar administratif terbaru, termasuk validasi sertifikat kenaikan kelas oleh pejabat setingkat Camat atau Kepala Dinas. Penggunaan instrumen perhitungan sistematis serta penerapan verifikasi ganda juga dilakukan untuk meminimalisir kesalahan data dukung dan memastikan akurasi pelaporan.

Dalam upaya menjaga keberlanjutan capaian kinerja pada tahun 2025, BPPP Bitung menetapkan beberapa strategi utama, antara lain melalui pendampingan kontinu oleh tenaga penyuluh pada setiap wilayah binaan guna menjamin kedekatan asistensi dengan pelaku usaha. Selain itu, dilakukan identifikasi terukur untuk mengklasifikasikan peningkatan kelas kelompok secara presisi berdasarkan kriteria objektif, serta memperkuat legalisasi formal melalui pengukuhan kelembagaan dengan Surat Keputusan yang diverifikasi oleh pejabat pemerintah daerah yang berwenang. Melalui implementasi strategi tersebut, diharapkan kelompok usaha perikanan dapat bertransformasi menjadi unit ekonomi yang lebih berkembang, mandiri, dan berdaya saing, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan anggota serta pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

IKSK.03.03 Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Bitung (kelompok)

Indikator Kinerja Utama (IKU) mengenai Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk merupakan parameter kinerja yang merefleksikan jumlah kelompok pelaku utama maupun pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan yang diinisiasi oleh Penyuluh Perikanan pada Satminkal BPPP Bitung. Proses penumbuhan kelompok tersebut dilaksanakan dengan merujuk pada kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan. Dalam pelaksanaannya, tenaga penyuluh melibatkan unsur pemerintah daerah serta berkoordinasi dengan Kepala Dinas Perikanan setempat guna menjamin legalitas dan keselarasan program di tingkat wilayah. Adapun rincian capaian IKU terkait pembentukan kelompok pada Satminkal BPPP Bitung tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 34. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Bitung (kelompok)

Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan									
IK 3. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Bitung (kelompok)									
Realisasi Capaian				2025				Rencana Kegiatan BPPP Bitung 2025-2029	
2021 - 2024									
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	% Penurunan 2024 - 2025	Target 2025	% Capaian Thd Target 2025
354,00	439,00	361,00	396,00	289,00	339,00	117,30	14,39	296,00	114,53

Berdasarkan data pada Tabel 34, dinamika pembentukan kelompok pelaku usaha oleh BPPP Bitung selama periode 2021 hingga 2024 menunjukkan tren yang fluktuatif, dengan pencapaian tertinggi tercatat sebanyak 439 kelompok pada tahun 2022 dan sebanyak 396 kelompok pada tahun 2024. Memasuki tahun anggaran 2025, BPPP Bitung berhasil melampaui target yang ditetapkan sebesar 289 kelompok dengan realisasi mencapai 339 kelompok, atau setara dengan tingkat efektivitas sebesar 117,30%. Meskipun secara kuantitas terdapat penurunan sebesar 14,39% dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, performa tahun 2025 tetap berada pada kategori sangat baik. Hal ini terbukti apabila realisasi (339 kelompok) tersebut disandingkan dengan target Tahun 2025 (296 kelompok) pada Rencana Kegiatan 2025–2029, di mana realisasi tahun 2025 telah melampaui rencana strategis tersebut dengan persentase pemenuhan sebesar 114,53%. Capaian ini menegaskan konsistensi instansi dalam mengakselerasi penumbuhan kelembagaan pelaku usaha kelautan dan perikanan sesuai dengan peta jalan organisasi yang telah ditetapkan.

Tabel 35. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Bitung per bidang dan gender

No	Bidang	Jumlah (kelompok)	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1	Budidaya	131	1.146	255
2	Penangkapan	151	1.553	35
3	Pengolahan/Pemasaran	49	72	419
4	Garam	1	6	4
5	Pengawasan/Konservasi	6	42	0
6	Wisata Bahari	1	5	4
	Jumlah	339	2.824	717

Berdasarkan data pada Tabel 35, kegiatan pembentukan kelompok pelaku usaha oleh BPPP Bitung telah mencakup tujuh sektor utama dengan total 339 kelompok yang melibatkan 3.541 partisipan, terdiri dari 2.824 laki-laki dan 717 perempuan. Sektor penangkapan merupakan bidang dengan keterlibatan terbesar, yakni sebanyak 151 kelompok dengan total 1.588 anggota yang didominasi oleh laki-

laki sebanyak 1.553 orang. Selanjutnya, bidang budidaya mencatatkan pembentukan 131 kelompok dengan total 1.401 anggota. Sementara itu, bidang pengolahan dan pemasaran yang terdiri dari 49 kelompok menunjukkan dominasi partisipasi perempuan yang signifikan, yakni sebanyak 419 orang dari total 491 anggota.

Di sisi lain, sektor-sektor seperti konservasi/pengawasan (6 kelompok), serta garam dan wisata bahari yang masing-masing terdiri dari 1 kelompok, menunjukkan skala partisipasi yang lebih spesifik namun tetap memberikan kontribusi terhadap diversitas pembentukan kelembagaan di wilayah tersebut. Mengingat realisasi kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) ini belum dapat diperbandingkan dengan standar nasional karena keterbatasan institusi pembanding yang setara, maka evaluasi dilakukan melalui studi komparasi dengan unit kerja di lingkup BPPSDMKP sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 36. Perbandingan realisasi Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Bitung (kelompok) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP

No	Nama Satker	Target Capaian Satker (kelompok)	Realisasi Capaian Satker (kelompok)	Persentase Realisasi Capaian Satker (%)
1	BPPP Medan	641	650	101,40
2	BPPP Tegal	-	-	-
3	BPPP Banyuwangi	772	950	120,00
4	BPPP Ambon	111	137	120,00
5	BPPP Bitung	289	339	117,30

Berdasarkan data pada Tabel 36, capaian indikator Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk di lingkup BPPSDMKP secara konsisten menunjukkan performa yang melampaui target. BPPP Banyuwangi dan BPPP Ambon mencatatkan persentase realisasi tertinggi sebesar 120,00%, dengan volume pembentukan masing-masing sebanyak 950 kelompok dan 137 kelompok. Capaian positif ini diikuti oleh BPPP Bitung dengan tingkat efektivitas sebesar 117,30% (339 kelompok) dan BPPP Medan sebesar 101,40% (650 kelompok). Sementara itu, BPPP Tegal tidak memiliki nilai capaian dikarenakan satuan kerja tersebut tidak mengampu IKU penyuluhan. Secara akumulatif, seluruh satuan kerja yang dibebani target telah berhasil memenuhi bahkan melampaui sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian IKU ini didorong oleh sinergi sumber daya manusia yang melibatkan aparat desa, pelaku utama, serta masyarakat luas, di bawah supervisi intensif dari Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Perikanan Bantu. Tingginya antusiasme masyarakat dalam membentuk kelembagaan mencerminkan peningkatan pemahaman publik terhadap manfaat kolektivitas dalam usaha perikanan. Selain itu, keterlibatan aktif penyuluh melalui sosialisasi lapangan dan pendampingan teknis menjadi faktor utama dalam memastikan kelompok yang terbentuk memiliki basis organisasi yang kuat dan terorganisir. Forum

koordinasi rutin setiap minggu juga berfungsi efektif sebagai instrumen monitoring pemenuhan data dukung serta wadah mitigasi terhadap berbagai kendala operasional di lapangan.

Guna menjamin keberlanjutan dan efektivitas kinerja pada tahun 2025, BPPP Bitung menerapkan beberapa langkah strategis, antara lain peningkatan intensitas pendampingan bagi kelompok baru agar mampu mencapai kemandirian usaha lebih cepat. Optimalisasi koordinasi dengan pemerintah daerah juga terus ditingkatkan untuk mempercepat proses legalisasi dan pengesahan kelompok sesuai regulasi yang berlaku. Melalui pengawasan dan evaluasi berkala, diharapkan setiap kelompok yang dibentuk tidak hanya memenuhi kriteria administratif, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan anggota serta pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

IKSK.03.04. Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Bitung (unit)

Indikator ini merefleksikan jumlah Gabungan Kelompok (Gapokan), Koperasi, maupun Korporasi yang mendapatkan pendampingan teknis dan manajerial dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan. Standar pendampingan tersebut dilaksanakan dengan merujuk pada kriteria yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan relevan lainnya. Melalui indikator ini, efektivitas penguatan kelembagaan ekonomi di tingkat pelaku usaha dapat diukur guna memastikan terciptanya struktur organisasi yang lebih formal, mandiri, dan berdaya saing tinggi.

Tabel 37. Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Bitung (unit)

Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan									
IK 4. Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Bitung (unit)									
Realisasi Capaian 2021 - 2024				2025				Rencana Kegiatan BPPP Bitung 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024 - 2025	Target 2025	% Capaian Thd Target 2025
-	-	-	-	27,00	28,00	103,70	0,00	27,00	103,70

Berdasarkan data pada Tabel 37 mengenai Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Bitung, terlihat bahwa kinerja pendampingan pada tahun anggaran 2025 telah melampaui target yang ditetapkan. BPPP Bitung menetapkan target sebesar 27 unit untuk tahun 2025 dan berhasil merealisasikan pendampingan sebanyak 28 unit, sehingga menghasilkan tingkat efektivitas sebesar 103,70%. Mengingat indikator ini merupakan IKU baru pada tahun 2025, perbandingan

dengan data historis periode 2021 hingga 2024 belum tersedia. Meskipun demikian, pencapaian tahun berjalan ini menunjukkan progres yang signifikan dalam pemenuhan sasaran tahun 2025 (103,70%) dibandingkan dengan Rencana Kegiatan BPPP Bitung periode 2025–2029. Selanjutnya, gabungan kelompok dan/atau koperasi yang mendapatkan pendampingan di BPPP Bitung terbagi atas Gapokan sebanyak 6 unit dan Koperasi sebanyak 22 unit.

Realisasi yang melampaui ambang batas 100% tersebut mengindikasikan efektivitas strategi pendampingan yang dijalankan oleh BPPP Bitung dalam upaya penguatan kapasitas gabungan kelompok maupun koperasi di wilayah kerja terkait. Hal ini menjadi fondasi penting dalam mendorong transformasi kelembagaan menuju kemandirian ekonomi yang lebih mapan. Dikarenakan realisasi kinerja IKU ini belum dapat diperbandingkan dengan standar nasional akibat keterbatasan institusi pembanding yang setara, maka evaluasi dilakukan melalui studi komparasi dengan unit kerja di lingkup BPPSDMKP sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 38. Perbandingan realisasi Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Bitung (unit) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP

No	Nama Satker	Target Capaian Satker (unit)	Realisasi Capaian Satker (unit)	% Persentase Realisasi Capaian Satker
1	BPPP Medan	47	57	120,00
2	BPPP Tegal	-	-	-
3	BPPP Banyuwangi	44	55	120,00
4	BPPP Ambon	19	20	105,26
5	BPPP Bitung	27	28	103,70

Berdasarkan data pada Tabel 38 mengenai Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi yang Mendapatkan Pendampingan di lingkup BPPSDMKP, seluruh satuan kerja yang memiliki target terkait menunjukkan performa yang melampaui sasaran kinerja yang ditetapkan. BPPP Medan dan BPPP Banyuwangi mencatatkan persentase realisasi tertinggi secara seragam, yakni sebesar 120,00%, dengan volume pendampingan masing-masing sebanyak 57 unit dan 55 unit gabungan kelompok/koperasi. Capaian positif ini diikuti oleh BPPP Ambon dengan realisasi sebesar 105,26% (20 unit), serta BPPP Bitung yang mencapai realisasi sebesar 103,70% melalui pendampingan terhadap 28 unit dari target awal 27 unit. Selaras dengan indikator kinerja lainnya, BPPP Tegal tidak mencatatkan nilai capaian dikarenakan satuan kerja tersebut tidak mengampu IKU penyuluhan. Secara umum, keberhasilan seluruh satuan kerja dalam melampaui target 100,00% mencerminkan efektivitas program pendampingan kelembagaan di wilayah kerja masing-masing.

Faktor utama yang mendukung keberhasilan pencapaian IKU ini di BPPP Bitung meliputi komitmen dan sinergi kolektif antara tenaga penyuluh perikanan, fasilitator lapangan, serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha sektor perikanan.

Keberhasilan tersebut juga dipengaruhi oleh pemetaan kebutuhan pendampingan yang presisi, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, serta koordinasi intensif dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan (stakeholder) terkait. Selain itu, dukungan kebijakan internal, sistem pelaporan yang terstruktur, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala turut memperkuat pencapaian indikator ini.

Langkah-langkah strategis yang telah diimplementasikan mencakup identifikasi dan pemetaan kelompok sasaran yang sistematis, penyusunan rencana kerja pendampingan yang terukur, serta pelaksanaan pelatihan dan fasilitasi teknis. Upaya penguatan kapasitas kelembagaan dan pembinaan manajemen usaha juga menjadi fokus utama, di samping pelaporan hasil pendampingan secara periodik sebagai instrumen evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan. Melalui pendekatan yang komprehensif ini, BPPP Bitung berkomitmen untuk terus mendorong transformasi gabungan kelompok dan koperasi menuju tata kelola organisasi yang mandiri, profesional, dan berdaya saing.

IKSK.03.05 Media penyuluhan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di BPPP Bitung (Paket)

Penyediaan media penyuluhan yang relevan dan tepat sasaran merupakan instrumen krusial dalam mendukung efektivitas pendampingan serta peningkatan kapasitas pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan. Di lingkup Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Bitung, pengembangan media penyuluhan dirancang secara sistematis dalam bentuk paket informasi yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan aktual para pelaku usaha di wilayah kerja terkait. Strategi ini selaras dengan komitmen BPPSDMKP untuk memastikan bahwa diseminasi informasi teknologi, manajemen usaha, serta regulasi terkini dapat terwujud melalui sarana yang aksesibel dan aplikatif bagi kelompok sasaran. Capaian kinerja pada indikator ini mencerminkan peran strategis BPPP Bitung dalam menyediakan dukungan teknis yang komunikatif dan edukatif guna mengakselerasi transformasi ekonomi masyarakat perikanan. Melalui standarisasi media yang terukur, diharapkan proses transfer pengetahuan dapat berjalan lebih optimal, sehingga mampu memperkuat daya saing kelembagaan pelaku usaha secara berkelanjutan. Adapun rincian capaian realisasi penyediaan media penyuluhan tersebut dapat dicermati pada pemaparan data berikut:

Tabel 39. Media penyuluhan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di BPPP Bitung (Paket)

Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan									
IK 5. Media penyuluhan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di BPPP Bitung (Paket)									
Realisasi Capaian				2025				Rencana Kegiatan BPPP Bitung 2025-2029	
2021 - 2024				Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024 - 2025	Target 2025	% Capaian Thd Target 2025
2021	2022	2023	2024						
-	-	-	-	1,00	1,00	100,00	0,00	1,00	100,00

Berdasarkan data pada Tabel 39 mengenai penyediaan media penyuluhan yang relevan dengan kebutuhan pelaku usaha, BPPP Bitung telah berhasil memenuhi target kinerja yang ditetapkan secara optimal. Pada tahun anggaran 2025, BPPP Bitung menetapkan target penyediaan media penyuluhan sebanyak 1 paket dan telah terealisasi sepenuhnya, sehingga menghasilkan persentase capaian sebesar 100,00%. Mengingat indikator ini merupakan IKU baru yang diimplementasikan pada tahun 2025, data historis untuk periode 2021 hingga 2024 belum tersedia. Namun, pencapaian tahun 2025 (100%) dibandingkan dengan Rencana Kegiatan BPPP Bitung periode 2025–2029 menjadi fondasi awal yang strategis.

Keberhasilan ini merefleksikan komitmen BPPP Bitung dalam menyediakan instrumen diseminasi informasi yang relevan guna mendukung kebutuhan teknis maupun manajerial bagi para pelaku usaha di wilayah kerjanya. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas transfer teknologi dan pemahaman regulasi di tingkat lapangan. Dikarenakan realisasi kinerja IKU ini belum dapat diperbandingkan dengan standar nasional akibat keterbatasan institusi pembanding dengan kompetensi yang setara, maka evaluasi dilakukan melalui studi komparasi dengan satuan kerja di lingkup BPPSDMKP sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 40. Perbandingan realisasi Media penyuluhan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di BPPP Bitung (Paket) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP

No	Nama Satker	Target Capaian Satker (paket)	Realisasi Capain Satker (paket)	% Persentase Realisasi Capaian Satker
1	BPPP Medan	1	1	100,00
2	BPPP Tegal	-	-	-
3	BPPP Banyuwangi	1	2	120,00
4	BPPP Ambon	1	1	100.00
5	BPPP Bitung	1	1	100,00

Berdasarkan data pada Tabel 40, capaian kinerja penyediaan media penyuluhan di lingkup BPPSDMKP menunjukkan hasil yang sangat positif, di mana seluruh satuan kerja berhasil memenuhi atau melampaui target yang telah ditetapkan. BPPP Banyuwangi mencatatkan persentase realisasi tertinggi sebesar 120,00%, dengan menghasilkan 2 paket media penyuluhan dari target 1 paket. Sementara itu, BPPP Medan, BPPP Ambon dan BPPP Bitung berhasil mencapai tingkat efektivitas mutlak sebesar 100,00% dengan merealisasikan masing-masing 1 paket media penyuluhan sesuai dengan sasaran yang direncanakan. Sejalan dengan indikator kinerja lainnya, BPPP Tegal tidak mencatatkan data target maupun realisasi dikarenakan tidak mengampu IKU penyuluhan. Secara keseluruhan, keberhasilan ini mencerminkan komitmen kuat dari setiap balai dalam menyediakan sarana diseminasi informasi yang relevan bagi kebutuhan pelaku usaha perikanan di wilayah kerja masing-masing.

Faktor utama yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator media penyuluhan di BPPP Bitung antara lain adalah akurasi identifikasi masalah serta kebutuhan teknologi informasi di kalangan pelaku usaha perikanan. Materi dalam paket media yang disusun telah diadaptasi dengan karakteristik sosial-ekonomi pelaku usaha lokal, sehingga mempermudah proses diseminasi dan implementasi teknologi di lapangan. Selain itu, ketersediaan tenaga penyuluh yang kompeten dalam mengolah konten teknis menjadi materi penyuluhan yang komunikatif turut menjadi kunci keberhasilan program ini. Langkah strategis yang diimplementasikan mencakup penyusunan paket media penyuluhan dalam format leaflet yang memuat panduan teknis praktis guna memfasilitasi pelaku usaha dalam mempelajari materi secara mandiri di lapangan. Konten dalam media tersebut disesuaikan secara spesifik dengan kebutuhan lokal agar materi instruksional yang diberikan tetap relevan dan aplikatif terhadap kendala teknis yang dihadapi di wilayah binaan BPPP Bitung. Melalui pendekatan ini, media penyuluhan diharapkan mampu menjadi instrumen edukasi yang efektif dalam mendorong produktivitas dan kemandirian pelaku usaha perikanan.

IKSK.03.06 Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BPPP Bitung (orang)

Penilaian kompetensi bagi penyuluh perikanan merupakan instrumen strategis dalam menjamin standar profesionalisme serta kualitas pelayanan penyuluhan di sektor kelautan dan perikanan. Indikator jumlah penyuluh yang lulus penilaian kompetensi merefleksikan tingkat kapabilitas aparatur dalam menguasai aspek teknis, manajerial, dan sosial kultural yang dipersyaratkan untuk mendampingi pelaku usaha secara efektif. Melalui proses penilaian yang terstandarisasi, para penyuluh diarahkan untuk memiliki kualifikasi profesional yang diakui secara nasional, sehingga mampu memberikan solusi pendampingan yang akurat, kredibel, dan akuntabel bagi masyarakat perikanan di wilayah kerjanya.

Pencapaian target pada indikator ini merupakan manifestasi nyata dari komitmen BPPP Bitung dalam melaksanakan pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola penyuluhan yang unggul, kompetitif, serta adaptif terhadap dinamika industri perikanan global. Dengan tersertifikasinya para penyuluh, BPPP Bitung memastikan bahwa setiap interaksi pendampingan di lapangan didasarkan pada kompetensi yang tervalidasi, yang pada akhirnya akan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pelaku utama di sektor kelautan dan perikanan.

Tabel 41. Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BPPP Bitung (orang)

Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan									
IK 6. Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BPPP Bitung (orang)									
Realisasi Capaian 2021 - 2024				2025				Rencana Kegiatan BPPP Bitung 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024 - 2025	Target 2025	% Capaian Thd Target 2025
-	-	-	-	4,00	4,00	100,00	0,00	0,00	100,00

Berdasarkan data yang tercantum pada Tabel 41, capaian kinerja untuk indikator jumlah penyuluh perikanan yang lulus penilaian kompetensi di BPPP Bitung pada tahun anggaran 2025 telah memenuhi target yang ditetapkan secara optimal. Dengan sasaran sebanyak 4 orang, BPPP Bitung berhasil merealisasikan seluruhnya, di mana 4 orang tenaga penyuluh dinyatakan lulus penilaian kompetensi, sehingga menghasilkan persentase capaian mutlak sebesar 100%. Mengingat indikator ini merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) baru yang mulai diimplementasikan pada tahun 2025, maka data historis untuk periode 2021 hingga 2024 belum tersedia. Perlu dicatat bahwa pada dokumen rencana kegiatan BPPP Bitung tahun 2025, indikator ini belum dibebankan target kinerja, dan penetapan target secara formal baru akan dimulai pada tahun anggaran 2026. Oleh karena itu, keberhasilan realisasi pada tahun 2025 (100%) ini menjadi fondasi serta titik awal yang signifikan dalam mendukung pemenuhan rencana strategis periode 2025–2029.

Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas balai dalam mengawal proses standardisasi kompetensi para penyuluh guna memastikan kepemilikan kualifikasi profesional yang tervalidasi dalam melaksanakan tugas pendampingan di lapangan. Hal ini menjadi jaminan kualitas layanan penyuluhan yang diberikan kepada masyarakat kelautan dan perikanan. Dikarenakan realisasi kinerja IKU ini belum dapat diperbandingkan dengan standar nasional akibat keterbatasan institusi pembanding yang setara, maka evaluasi dilakukan melalui studi komparasi dengan satuan kerja di lingkup BPPSDMKP sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 42. Perbandingan realisasi Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BPPP Bitung (orang) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP

No	Nama Satker	Target Capaian Satker (orang)	Realisasi Capain Satker (orang)	Persentase Realisasi Capaian Satker (%)
1	BPPP Medan	-	-	-
2	BPPP Tegal	-	-	-
3	BPPP Banyuwangi	9	11	120,00
4	BPPP Ambon	-	-	-
5	BPPP Bitung	4	4	100,00

Berdasarkan data pada Tabel 42, capaian kinerja untuk indikator jumlah penyuluh perikanan yang lulus penilaian kompetensi menunjukkan tingkat keberhasilan yang optimal pada satuan kerja yang memiliki target terkait. BPPP Banyuwangi mencatatkan jumlah kelulusan tertinggi sebanyak 11 orang, yang secara presisi memenuhi sasaran kerja sehingga menghasilkan persentase capaian sebesar 120,00%. Sementara itu, BPPP Bitung berhasil merealisasikan seluruh target dengan meluluskan 4 orang tenaga penyuluh, yang merepresentasikan tingkat capaian mutlak sebesar 100,00%. Adapun satuan kerja lainnya, yakni BPPP Medan, BPPP Tegal, dan BPPP Ambon, BPPP Tegal tidak mencatatkan data target maupun realisasi dikarenakan tidak mengampu IKU tersebut. Secara akumulatif, data tersebut menegaskan komitmen kuat dari BPPP Banyuwangi dan BPPP Bitung dalam memastikan tenaga fungsional penyuluh memiliki kompetensi terstandar yang diakui secara profesional.

Faktor utama keberhasilan BPPP Bitung dalam mencapai target kelulusan penilaian kompetensi didukung oleh tingginya kesiapan peserta dalam memenuhi persyaratan portofolio serta kepemilikan pengalaman lapangan yang mumpuni, yang secara signifikan memudahkan proses verifikasi kompetensi. Selain itu, dukungan manajerial melalui fasilitasi administratif dan pemberian alokasi waktu khusus bagi para penyuluh untuk fokus mengikuti tahapan penilaian menjadi faktor pendorong yang krusial. Ketepatan dalam pemetaan kualifikasi jabatan fungsional serta koordinasi intensif dengan lembaga penyelenggara sertifikasi memastikan bahwa seluruh personel yang diusulkan memiliki kesiapan teknis sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan.

Sebagai langkah implementatif, BPPP Bitung telah melaksanakan serangkaian kegiatan strategis, diawali dengan pemetaan dan pengusulan kandidat yang memenuhi kualifikasi persyaratan jabatan kepada Sekretariat BPPSDMKP. Balai juga memberikan asistensi penuh dalam pemenuhan kelengkapan administrasi guna memastikan seluruh dokumen pendukung memenuhi standar yang dipersyaratkan oleh pusat tepat pada waktunya. Melalui koordinasi aktif yang dilakukan secara berkelanjutan dengan pihak Sekretariat, BPPP Bitung berhasil mengawal perkembangan proses penilaian hingga tercapainya realisasi 100,00%, selaras dengan peta jalan pengembangan sumber daya manusia yang telah direncanakan.

IKSK.03.07 Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BPPP Bitung (orang)

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis bagi tenaga penyuluh merupakan langkah strategis untuk menjamin kualitas pendampingan kepada pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan. Indikator jumlah penyuluh yang lulus pelatihan teknis menjadi tolok ukur fundamental dalam mengevaluasi profesionalisme dan kapabilitas aparatur dalam menguasai inovasi teknologi serta regulasi sektoral terbaru. Melalui program pengembangan kompetensi yang terstruktur, para penyuluh diharapkan

mampu mentransformasikan pengetahuan teknis menjadi solusi aplikatif dalam memitigasi berbagai hambatan yang dihadapi masyarakat perikanan di wilayah kerja BPPP Bitung.

Pencapaian kinerja pada indikator ini mencerminkan komitmen kuat dalam mencetak tenaga pendamping yang andal dan kompetitif guna mendukung terwujudnya tata kelola penyuluhan yang efektif serta berkelanjutan. Standardisasi kompetensi melalui pelatihan ini tidak hanya bertujuan untuk pemenuhan aspek administratif, namun juga sebagai upaya akselerasi transfer teknologi dari instansi ke tingkat pelaku utama. Dengan demikian, peningkatan frekuensi kelulusan pelatihan teknis diharapkan secara linier dapat meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan penyuluhan yang diberikan oleh BPPP Bitung.

Tabel 43. Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BPPP Bitung (orang)

Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan									
IK 7. Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BPPP Bitung (orang)									
Realisasi Capaian				2025				Rencana Kegiatan BPPP Bitung 2025-2029	
2021 - 2024				Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024 - 2025	Target 2025	% Capaian Thd Target 2025
2021	2022	2023	2024						
-	-	-	-	8,00	10,00	120,00	0,00	0,00	120,00

Berdasarkan data pada Tabel 43, capaian kinerja BPPP Bitung untuk indikator jumlah penyuluh yang lulus pelatihan teknis pada tahun anggaran 2025 menunjukkan hasil yang sangat signifikan dengan melampaui target yang telah ditetapkan. Dari target awal sebanyak 8 orang, realisasi di lapangan berhasil mencapai 10 orang, sehingga menghasilkan persentase capaian kinerja sebesar 120,00%. Mengingat indikator ini merupakan IKU baru yang mulai diimplementasikan pada tahun 2025, data historis untuk periode 2021 hingga 2024 belum tersedia. Namun, pencapaian yang melampaui target pada tahun berjalan ini (dibandingkan dengan rencana kegiatan 2025-2029) menegaskan komitmen kuat BPPP Bitung dalam mengakselerasi peningkatan kompetensi teknis para penyuluhnya guna mendukung pencapaian sasaran rencana kegiatan BPPP Bitung.

Keberhasilan ini membuktikan efektivitas manajemen program pelatihan dalam mencetak tenaga pendamping yang memiliki kualifikasi teknis mumpuni serta siap memberikan asistensi berkualitas bagi pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan. Hal ini juga mencerminkan sinergi yang baik antara perencanaan pengembangan SDM dengan antusiasme aparatur dalam memperbarui pengetahuan mereka. Dikarenakan realisasi kinerja IKU ini belum dapat diperbandingkan dengan standar nasional akibat keterbatasan institusi pembanding yang memiliki kompetensi setara, maka evaluasi dilakukan melalui studi komparasi dengan satuan kerja di

lingkup BPPSDMKP sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 44. Perbandingan realisasi Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BPPP Bitung (orang) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP

No	Nama Satker	Target Capaian Satker (orang)	Realisasi Capain Satker (orang)	Persentase Realisasi Capaian Satker (%)
1	BPPP Medan	11	14	120,00
2	BPPP Tegal	-	-	-
3	BPPP Banyuwangi	15	27	120,00
4	BPPP Ambon	37	45	120,00
5	BPPP Bitung	8	10	120,00

Berdasarkan data pada Tabel 44, realisasi kinerja jumlah penyuluh kelautan dan perikanan yang lulus pelatihan teknis di lingkup BPPSDMKP menunjukkan tren positif yang signifikan. Seluruh satuan kerja yang memiliki target kinerja berhasil melampaui sasaran yang telah ditetapkan dengan persentase capaian realisasi yang seragam sebesar 120%. Secara kuantitatif, BPPP Ambon mencatatkan angka kelulusan tertinggi dengan realisasi sebanyak 45 personel dari target 37 orang, disusul oleh BPPP Banyuwangi dengan 27 orang dari target 15 orang, BPPP Medan sebanyak 14 orang dari target 11 orang, serta BPPP Bitung dengan 10 orang dari target 8 orang. Adapun BPPP Tegal tidak mencatatkan nilai target maupun realisasi dikarenakan tidak mengampu IKU penyuluhan. Secara kolektif, capaian ini mengindikasikan efektivitas penyelenggaraan pelatihan teknis dalam memenuhi kebutuhan standarisasi kompetensi penyuluh di lapangan.

Faktor utama keberhasilan BPPP Bitung dalam melampaui target hingga mencapai angka 120,00% didorong oleh tingginya inisiatif serta kemandirian para penyuluh dalam mengakses program pengembangan kompetensi secara proaktif. Keberhasilan ini didukung pula oleh respons manajerial yang cepat melalui pemberian dukungan administratif berupa penerbitan surat tugas, sehingga para penyuluh memiliki legalitas penuh untuk mengikuti pelatihan yang relevan. Sinergi antara semangat pengembangan diri dari tenaga penyuluh dengan fasilitasi dari satuan kerja memastikan jumlah personel yang bersertifikat kompetensi teknis terbaru melampaui proyeksi awal tahun anggaran 2025. Sebagai langkah strategis, BPPP Bitung memberikan dukungan komprehensif bagi penyuluh yang secara mandiri mengajukan keikutsertaan dalam berbagai program pelatihan teknis sesuai kebutuhan spesifik di wilayah binaan masing-masing. Balai secara formal memfasilitasi setiap tahapan peningkatan kapasitas tersebut guna menjamin kelancaran proses pembelajaran. Selain itu, dilakukan pendataan dan pemantauan secara berkala terhadap sertifikat kelulusan yang diperoleh untuk memastikan bahwa target sepuluh orang yang lulus pelatihan teknis tercapai secara optimal, yang pada akhirnya dapat segera diimplementasikan dalam memperkuat kualitas kegiatan pendampingan kepada pelaku usaha perikanan.

3.3. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2025

3.3.1. Realisasi Anggaran

Berdasarkan data laporan realisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) per 31 Desember 2025, BPPP Bitung mencatatkan kinerja penyerapan anggaran yang sangat optimal. Realisasi belanja hingga akhir tahun anggaran 2025 tercatat sebesar Rp52.382.692.818,- atau mencapai 98,78% dari total alokasi pagu efektif sebesar Rp53.027.224.000,-. Tingginya persentase penyerapan ini mencerminkan komitmen satuan kerja dalam mengimplementasikan rencana kerja secara akuntabel dan tepat waktu. Rincian lebih lanjut mengenai distribusi realisasi anggaran tersebut pada masing-masing komponen kegiatan dapat dicermati pada tabel di bawah ini:

Tabel 45. Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2025

No	Sasaran Kinerja	No	Indikator	Pagu Total	Realisasi	Persentase Realisasi Pagu Total (%)
1	Terselenggaranya Pelatihan Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan Pelatihan Pelatihan KP Kompeten Satker BPPP Bitung yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (%)	-	-	0,00
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Bitung (orang)	40.700.000	40.429.300	99,34
		3	Nilai PNBP Satker BPPP Bitung (rupiah miliar)	90.874.000	-	0,00
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	4	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Bitung (%)	7.109.381.000	6.981.387.422	98,20
		5	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Bitung (indeks)	-	-	0,00
		6	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Bitung (%)	-	-	0,00
		7	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Bitung (nilai)	2.096.000	2.038.900	97,27
		8	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Bitung (%)	2.220.311.000	2.171.842.318	97,82
		9	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Bitung (%)	-	-	0,00
		10	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai)	2.000.000	1.994.900	99,75
		11	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai)	-	-	0,00
	TOTAL			9.465.362.000	9.197.692.840	97,17
3	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh BPPP Bitung (kelompok)	2.344.000.000	2.343.839.200	99,99
		2	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Bitung (kelompok)	-	-	0,00
		3	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Bitung (kelompok)	-	-	0,00
		4	Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Bitung (unit)	-	-	0,00
		5	Media penyuluhan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di BPPP Bitung (Paket)	-	-	0,00
		6	Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BPPP Bitung (orang)	41.217.862.000	40.841.160.778	99,09
		7	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BPPP Bitung (orang)	2.344.000.000	2.343.839.200	99,99
	TOTAL			43.561.862.000	43.184.999.978	99,13
	TOTAL PELATIHAN + PENYULUHAN			53.027.224.000	52.382.692.818	98,78

Sumber : Saktiweb

Berdasarkan data pada Tabel 45 mengenai Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2025, BPPP Bitung secara keseluruhan menunjukkan kinerja keuangan yang sangat efektif dengan total persentase realisasi mencapai 98,78%. Dari total pagu sebesar Rp53.027.224.000, satuan kerja berhasil menyerap anggaran senilai Rp52.382.692.818 untuk mendukung berbagai sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Pada sektor Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM, tercatat realisasi sebesar Rp9.197.692.840 atau 97,17% dari pagu sebesar Rp9.465.362.000. Komponen penyerap utama pada sektor ini meliputi kegiatan pengelolaan BMN (97,82%), pelaksanaan anggaran (99,75%), serta pelayanan dukungan manajemen internal yang mencapai 98,20%. Sementara itu, pada sektor Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, penyerapan anggaran mencapai angka yang lebih tinggi yaitu 99,13%, dengan realisasi sebesar Rp43.184.999.978 dari pagu Rp43.561.862.000. Beberapa indikator dalam sektor ini, seperti pembentukan kelompok dan penyelenggaraan pelatihan teknis bagi penyuluh, mencatatkan persentase realisasi yang hampir sempurna yakni mencapai 99,99%. Tingginya persentase penyerapan di seluruh lini ini merefleksikan kedisiplinan fiskal dan akuntabilitas BPPP Bitung dalam mengimplementasikan program kerja sepanjang tahun anggaran 2025.

3.3.2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya di BPPP Bitung

Implementasi pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran di lingkungan BPPP Bitung dilakukan secara konsisten dengan merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sesuai dengan mandat Pasal 7 ayat (2) pada peraturan tersebut, penilaian kinerja anggaran difokuskan pada empat variabel utama, yaitu capaian keluaran (output), tingkat penyerapan anggaran, aspek efisiensi, serta konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan. Dalam operasionalisasinya, pengukuran nilai kinerja anggaran tersebut dilakukan melalui aplikasi SMART DJA sebagai perangkat resmi yang terintegrasi. Dalam konteks manajemen internal, efisiensi sumber daya pada BPPP Bitung diukur melalui analisis selisih antara persentase capaian kinerja indikator dengan persentase realisasi anggaran yang digunakan. Rasio ini memberikan gambaran objektif mengenai optimalisasi sumber daya dalam menghasilkan keluaran yang telah ditargetkan. Perbandingan komprehensif antara capaian kinerja dengan realisasi anggaran tersebut tersaji secara terperinci dalam tabel di bawah ini:

Tabel 46. Efisiensi Anggaran Per 31 Desember 2025 BPPP Bitung

Sasaran Kinerja	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Pagu Total	Realisasi	Persentase Realisasi Pagu Total (%)	Persentase Efisiensi (%)
Terselenggara nya Pelatihan Kelautan dan Perikanan	Persentase Lulusan Pelatihan Pelatihan KP Kompeten Satker BPPP Bitung yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (%)	100,21	-	-	0,00	100,21
	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Bitung (orang)	118,75	40.700.000	40.429.300	99,34	19,41
	Nilai PNBSP Satker BPPP Bitung (rupiah miliar)	116,40	90.874.000	-	0,00	116,4
Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Bitung (%)	100,00	7.109.381.000	6.981.387.422	98,20	1,8
	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Bitung (indeks)	83,82	-	-	0,00	83,82
	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Bitung (%)	100,00	-	-	0,00	100
	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Bitung (nilai)	103,94	2.096.000	2.038.900	97,27	6,67
	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Bitung (%)	118,75	2.220.311.000	2.171.842.318	97,82	20,93
	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Bitung (%)	120,00	-	-	0,00	120
	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai)	106,09	2.000.000	1.994.900	99,75	6,34
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai)	120,00	-	-	0,00	120
	TOTAL		9.465.362.000	9.197.692.840	97,17	63,23
Terselenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh BPPP Bitung (kelompok)	120,00	2.344.000.000	2.343.839.200	99,99	20,01
	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Bitung (kelompok)	120,00	-	-	0,00	120
	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Bitung (kelompok)	117,30	-	-	0,00	117,3
	Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Bitung (unit)	103,70	-	-	0,00	103,7
	Media penyuluhan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di BPPP Bitung (Paket)	100,00	-	-	0,00	100
	Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BPPP Bitung (orang)	100,00	41.217.862.000	40.841.160.778	99,09	0,91
	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BPPP Bitung (orang)	120,00	2.344.000.000	2.343.839.200	99,99	20,01
	TOTAL		43.561.862.000	43.184.999.978	99,13	68,85
TOTAL PELATIHAN + PENYULUHAN			51.016.036.998	38.896.266.472	98,78	66,04

Sumber : Aplikasi Kinerja KKP dan Saktiweb

Berdasarkan data pada Tabel 46 mengenai Efisiensi Anggaran Per 31 Desember 2025, BPPP Bitung menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat baik dengan rata-rata persentase efisiensi mencapai 63,23%. Nilai efisiensi ini dihitung berdasarkan selisih antara persentase capaian kinerja terhadap persentase realisasi anggaran, yang mencerminkan optimalisasi penggunaan sumber daya dalam mencapai target output yang ditetapkan. Pada sasaran kinerja Terselenggaranya Pelatihan Kelautan dan Perikanan, rata-rata efisiensi tercatat sebesar 77,01%. Angka ini didorong oleh efisiensi tinggi pada indikator Nilai PNBP sebesar 116,40% serta persentase lulusan pelatihan yang mencapai 100,21%. Sementara itu, pada sasaran Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel, rata-rata efisiensi mencapai 50,11%, dengan kontribusi signifikan dari indikator Persentase Rencana Umum Pengadaan (120,00%) dan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (120,00%). Pencapaian ini mengindikasikan bahwa BPPP Bitung mampu menghasilkan capaian kinerja yang melampaui target (*overshoot*) dengan penggunaan anggaran yang tetap terkendali dan efisien, sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan negara yang akuntabel.

Pencapaian efisiensi anggaran di BPPP Bitung dilakukan melalui empat alur tahapan strategis yang terintegrasi untuk memastikan penggunaan sumber daya dilakukan secara optimal dan akuntabel. Tahapan tersebut meliputi:

1. Perencanaan

Perencanaan Strategis dan Penetapan Prioritas BPPP Bitung menerapkan dimensi efisiensi yang berorientasi pada kemanfaatan melalui inisiatif strategis berupa penetapan serta pengawalan indikator outcome. Selain itu, efisiensi dilakukan dengan menetapkan skala prioritas kegiatan, di mana pada Triwulan II Tahun 2025, kegiatan prioritas telah dikawal secara intensif melalui laporan mingguan (*weekly report*) dan pembahasan berkala bulanan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang memadai.

2. Pelaksanaan

Strategi Pelaksanaan Kegiatan Dalam aspek implementasi, BPPP Bitung menerapkan pola koordinasi, sosialisasi, supervisi, dan evaluasi melalui metode daring maupun campuran (*blended*). Seluruh pelaksanaan kegiatan diselaraskan dengan Perjanjian Kinerja pimpinan yang berbasis Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), serta difokuskan pada penguatan kegiatan penyuluhan guna mendukung program prioritas Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan.

3. Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi

Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Terintegrasi Pengawasan pengelolaan anggaran dilaksanakan secara rutin guna menjamin ketepatan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Proses pemantauan telah bertransformasi melalui digitalisasi dengan memanfaatkan berbagai aplikasi pendukung seperti E-Pegawai KKP, Kinerjaku KKP, Emonev Bappenas, OM SPAN DJPB Kemenkeu, serta Weekly Report internal. Sistem ini mempercepat perolehan informasi kinerja bagi pimpinan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis. Selain itu, pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai dioptimalkan sebagai instrumen insentif yang dibayarkan berdasarkan capaian kinerja, progres pekerjaan, dan tingkat kehadiran.

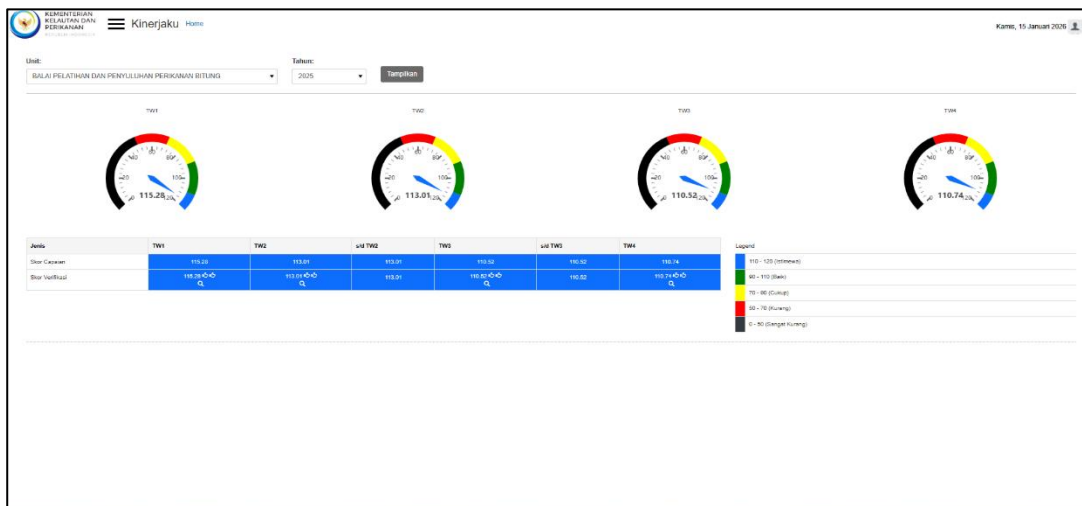
4. Penyesuaian

Penyesuaian dan Reviu Organisasi Sebagai tahap akhir, BPPP Bitung bersikap adaptif terhadap dinamika organisasi dengan melakukan revisi indikator, target, maupun volume anggaran apabila hasil reviu menunjukkan perlunya perubahan atau pergeseran. Melalui proses identifikasi dan revisi yang sistematis, penyesuaian anggaran dilakukan secara terukur demi menjamin tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

BAB IV. PENUTUP

4.1. Capaian Kinerja Utama

Pengukuran capaian kinerja BPPP Bitung pada tahun anggaran 2025 dilaksanakan melalui analisis komparatif antara target yang telah direncanakan dengan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif organisasi. Seluruh proses pencatatan, pemantauan, dan pengukuran data kinerja diintegrasikan melalui platform digital resmi yaitu <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang komprehensif tersebut, BPPP Bitung berhasil mencatatkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tahun 2025 sebesar 110,74% (Istimewa). Pencapaian ini mengindikasikan bahwa secara kolektif, sasaran strategis balai telah terealisasi melampaui target ambang batas yang ditetapkan, yang mencerminkan efektivitas dan produktivitas tinggi dalam pelaksanaan program kerja sepanjang tahun.



Gambar 4. Nilai Kinerja Organisasi BPPP Bitung

Sumber : web.kinerjaku.kkp.go.id

Capaian kinerja yang dicapai yaitu pada 3 Sasaran Strategis dan 18 indikator kinerja utama sebagai berikut :

1. Terselenggaranya Pelatihan Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:
 - Persentase Lulusan Pelatihan Pelatihan KP Kompeten Satker BPPP Bitung yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (%) tercapai sebesar 75,16% dari target yaitu 75% dengan persentase 100,21%;
 - Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Bitung (orang) sebesar 475 orang dari target 400 orang dengan persentase 118,75%;
 - Nilai PNBP Satker BPPP Bitung (rupiah miliar) sebesar 0,23 rupiah miliar dari target yaitu sebesar 0,189 rupiah miliar dengan persentase 120%;
2. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan:
 - Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Bitung (%) tercapai 100% dari target yaitu 100% atau dengan persentase capaian 100%;
 - Indeks Profesionalitas ASN BPPP Bitung (indeks) sebesar 83 dari target yaitu 83,82 atau dengan persentase capaian 100,99%;

- Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Bitung yaitu 85% dari target 85% atau dengan persentase capaian 100%;
 - Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Bitung (nilai) sebesar 83,15 dari target yaitu 80 atau dengan persentase capaian 103,93;
 - Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Bitung (%) sebesar 95% dari target 80% atau dengan persentase capaian 118,75%;
 - Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ (%) yang diumumkan pada SIRUP BPPP Bitung yaitu 100% dari target 80% atau dengan persentase capaian 120%;
 - Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai) sebesar 97,60 dari target 92 atau dengan persentase capaian 106,09%;
 - Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai) sebesar 100 dari target 71,5 atau dengan persentase capaian 120%;
3. Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan :
- Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh BPPP Bitung (kelompok) sebanyak 3.000 kelompok dari target yaitu 2.530 kelompok atau dengan persentase 120%;
 - Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Bitung (kelompok) sebanyak 80 kelompok dari target yaitu 110 kelompok atau dengan persentase 120%;
 - Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Bitung (kelompok) sebanyak 339 kelompok dari target sebesar 289 kelompok atau dengan persentase 117,30%.
 - Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Bitung (unit) sebanyak 28 kelompok dari target sebesar 27 kelompok atau dengan persentase 103,70%;
 - Media penyuluhan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di BPPP Bitung (Paket) sebanyak 1 paket dari target 1 paket atau dengan persentase 100%;
 - Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BPPP Bitung (orang) sebanyak 4 orang dari target 4 orang atau dengan persentase 100%;.
 - Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BPPP Bitung (orang) sebanyak 10 orang dari target 8 orang atau dengan persentase 120%;.

4.2. Permasalahan dan Rekomendasi

Secara keseluruhan, capaian kinerja BPPP Bitung pada tahun anggaran 2025 telah menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dengan perolehan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) mencapai 110,74% (Istimewa). Pencapaian yang melampaui target ambang batas ini merefleksikan efektivitas manajerial serta komitmen seluruh jajaran dalam merealisasikan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Kendati demikian, hasil ini menjadi tantangan sekaligus landasan pacu bagi organisasi untuk terus melakukan inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Diharapkan pada tahun anggaran mendatang, tren positif ini dapat dipertahankan atau ditingkatkan secara progresif, guna mewujudkan performa organisasi yang lebih unggul dibandingkan capaian tahun berjalan.

LAMPIRAN - LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAR www.kkp.go.id SUREL brsdrm@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Natalia**
Jabatan : Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Lilly Aprilya Pregiwati**
Jabatan : Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Pusat Pelatihan
Kelautan dan Perikanan



Lilly Aprilya Pregiwati

Pihak Pertama
Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Bitung

Natalia

LEMBAR PENGESAHAN		
NO	JABATAN	PARAF
1.	Katimja Serapan Lulusan dan Kemitraan	
2.		



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id SUREL brsdm@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Natalia**
Jabatan : Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Lilly Aprilya Pregiwati**
Jabatan : Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

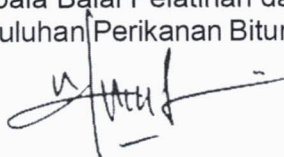
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Pusat Pelatihan
Kelautan dan Perikanan

Lilly Aprilya Pregiwati

Pihak Pertama
Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Bitung

Natalia



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id SUREL brsdrm@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN
BITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Natalia**
Jabatan : Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan

BitungSelanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Lilly Aprilya Pregiwati**
Jabatan : Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan Selaku atasan pihak

pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian targetkinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 Desember 2025

Pihak Kedua
Kepala Pusat Pelatihan
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Lilly Aprilya Pregiwati

Pihak Pertama
Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Bitung



Ditandatangani
Secara Elektronik

Natalia

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya Pelatihan Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan Pelatihan Pelatihan KP Kompeten Satker BPPP Bitung yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (%)	75
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Bitung (orang)	400
		3	Nilai PNBP Satker BPPP Bitung (rupiah miliar)	0,189
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	4	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Bitung (%)	100
		5	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Bitung (indeks)	83
		6	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Bitung (%)	85
		7	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Bitung (nilai)	80
		8	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Bitung (%)	80
		9	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Bitung (%)	80
		10	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai)	92
		11	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai)	71,5

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pelatihan Kelautan dan Perikanan	166.574.000
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	9.298.788.000
Total Anggaran BPPP BITUNG		9.465.362.000

Jakarta, 17 Desember 2025

Pihak Kedua
Kepala Pusat Pelatihan
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Lilly Aprilya Pregiwati

Pihak Pertama
Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Bitung



Ditandatangani
Secara Elektronik

Natalia



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN BANYUWANGI MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id SUREL brsdm@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Natalia**

Jabatan : Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Yayan Hikmayani**

Jabatan : Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Pusat Penyuluhan
Kelautan dan Perikanan



Yayan Hikmayani

Pihak Pertama
Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan
Perikanan Bitung



Natalia

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Disuluh BPPP Bitung (kelompok)	2.998
		2	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Bitung (kelompok)	80
		3	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Bitung (kelompok)	296
		4	Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Bitung (unit)	27
2	Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	5	Media Penyuluhan Sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BPPP Bitung	1
3	Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	6	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BPPP Bitung (orang)	8

Data Anggaran

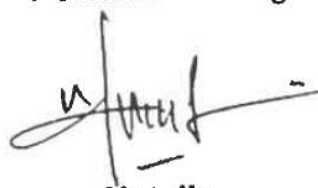
No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	2.500.363.000
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	35.032.427.000
Total Anggaran BPPP Bitung		37.532.790.000

Jakarta, 30 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Pusat Penyuluhan
Kelautan dan Perikanan


Yayan Hikmayani

Pihak Pertama
Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan
Perikanan Bitung


Natalia



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN BANYUWANGI MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id SUREL brsdrm@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Natalia**

Jabatan : Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Yayan Hikmayani**

Jabatan : Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 14 April 2025

Pihak Kedua
Kepala Pusat Penyuluhan
Kelautan dan Perikanan

Yayan Hikmayani

Pihak Pertama
Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Bitung

Natalia

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Disuluh BPPP Bitung (kelompok)	2.998
		2	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Bitung (kelompok)	80
		3	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Bitung (kelompok)	296
		4	Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Bitung (unit)	27
2	Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	5	Media Penyuluhan Sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BPPP Bitung (Paket)	1
3	Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	6	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BPPP Bitung (orang)	8

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	2.355.850.000
2	Dukungan Manajemen Internal	35.032.427.000
Total Anggaran BPPP Bitung		37.388.277.000

Jakarta, 14 April 2025

Pihak Kedua
Kepala Pusat Penyuluhan
Kelautan dan Perikanan



Yayan Hikmayani

Pihak Pertama
Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Bitung



Natalia



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN BANYUWANGI MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAR www.kkp.go.id SUREL brsdrm@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Natalia

Jabatan : Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Yayan Hikmayani

Jabatan : Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 11 Desember 2025

PIHAK KEDUA

**Kepala Pusat Penyuluhan
Kelautan dan Perikanan**



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Yayan Hikmayani

PIHAK PERTAMA

**Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Bitung**



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Natalia

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh BPPP Bitung (kelompok)	2.530
		2	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Bitung (kelompok)	80
		3	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Bitung (kelompok)	289
		4	Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Bitung (unit)	27
		5	Media penyuluhan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di BPPP Bitung (Paket)	1
		6	Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BPPP Bitung (orang)	4
		7	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BPPP Bitung (orang)	8

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	2.344.000.000
2	Dukungan Manajemen Internal	41.217.862.000
Total Anggaran BPPP Bitung		43.561.862.000

Jakarta, 11 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Kepala Pusat Penyuluhan
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Yayan Hikmayani

PIHAK PERTAMA
Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Bitung



Ditandatangani
Secara Elektronik

Natalia



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG

JALAN TANDURUSA KELURAHAN AERTEMBAGA
DUA BITUNG 95526 KOTAK POS 18/Bt BITUNG 95501
TELEPON (0438) 21650, 21681 (LACAK), FAKSIMILE (0438) 31477
LAMAN sekretariat@bpppbitung.com

SURAT TUGAS

Nomor : B.27/BPPP.BTG/TU.140/I/2025

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya program dan kegiatan pelatihan dan penyuluhan di BPPP Bitung, maka dipandang perlu untuk melaksanakan pengelolaan kinerja yaitu mulai dari tahap perencanaan, pemantauan dalam rangka mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin, dan tahap evaluasi sampai dengan tahap penyusunan laporan kinerja atas capaian kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu menunjuk Tim Teknis Tata Kelola Kinerja Tahun 2025;
 - c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam dalam keputusan ini, dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Teknis Tata Kelola Kinerja Tahun 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperbaharui dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014 tentang perubahan ke enam atas Perpres Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.10/MEN/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.10/MEN/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Kelautan dan Perikanan.

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA- 032.12.2.239260/2025 tanggal 2 Desember 2024;

MEMBERI TUGAS

Kepada : Pegawai sebagaimana terlampir (Lampiran I)

Sebagai : Tim Teknis Tata Kelola Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung

Dengan Tugas : 1. Pengarah dan Penanggung Jawab
Memberikan arahan dan bimbingan dalam perumusan kebijakan dan pengambilan langkah-langkah strategis dalam penyusunan laporan kinerja atas kegiatan pelatihan dan penyuluhan KP, serta bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan

2. Ketua Tim Teknis Tata Kelola Kinerja

- a. Melakukan Koordinasi, Pengendalian dan Pendampingan dalam rangka melaksanakan verifikasi dan validasi data dukung capaian kinerja pelatihan dan penyuluhan KP
- b. Melaksanakan koordinasi dengan Tim dalam rangka penyusunan laporan kinerja

3. Sekretaris Tim Teknis Tata Kelola Kinerja

- a. Melakukan pemantauan dan mengidentifikasi permasalahan dalam setiap tahapan proses pelaksanaan kegiatan pelatihan dan penyuluhan KP secara triwulanan dan tahunan;
- b. Melakukan pengukuran dan evaluasi atas pencapaian kinerja pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan KP sesuai rencana kinerja secara berkala, baik bulanan, triwulanan dan tahunan;
- c. Melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan KP sesuai rencana kinerja secara berkala, baik bulanan, triwulanan dan tahunan;

d. Melakukan pelaporan atas hasil pemantuan pelaksanaan kegiatan pelatihan dan penyuluhan KP terhadap rencana kinerja tahun 2025 dengan membuat dokumen Evaluasi Kinerja Triwulanan dan Tahunan.

4. Penanggung Jawab Data Capaian Kinerja

Menyampaikan data sesuai form excel capaian kinerja yang telah diverifikasi oleh PIC Tim Kerja masing-masing kepada Tim Verifikator dan Validator;

5. Tim Verifikator dan Validator Data Capaian Kinerja

- a. Melakukan verifikasi dan validasi data dukung capaian kinerja dari masing-masing penanggung jawab data secara berkala (bulanan, triwulanan dan tahunan);
- b. Mendokumentasikan hasil verifikasi dan validasi data dukung capaian kinerja secara berkala (bulanan, triwulanan dan tahunan).

Biaya : Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas ini dibebankan pada DIPA BPPP Bitung Tahun Anggaran 2025

Keterangan : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Tugas ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Bitung, 8 Januari 2025
Kepala Balai,

Natalla, S.St.Pi., M.Pi.
NIP. 19801225 200502 2 001

**DAFTAR NAMA TIM TEKNIS TATA KELOLA KINERJA
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG
TAHUN 2025**

Pengarah dan Penanggung Jawab	:	Kepala Balai
Ketua	:	Merlyn Diana Manurung, S.St.Pi., M.Si.
Sekretaris	:	Muhammad Fiqi Zulendra, S.S.T.Pi., M.Tr.Pi.
Penanggung Jawab Data Capaian Kinerja Pelatihan	:	Pungky Herlambang, A.Md., S.Tr.Pi.
Penanggung Jawab Data Capaian Kinerja Penyuluhan	:	Ledy J. E. Pangkola, S.H., M.H.
Penanggung Jawab Data Capaian Kinerja Dukungan Manajemen	:	Sri Widiyanti, S.Pi.
Tim Verifikator dan Validator		
- Data Capaian Kinerja Pelatihan	:	Adi Kuswoyo, S.Pi
- Data Capaian Kinerja Penyuluhan	:	- Ir. Sari J. Kasijo
	:	- Trixa Rumajar, S.Pi., M.Si.
	:	- Deysy Marya Puansalaing, S.Pi., M.Si
- Data Capaian Kinerja Dukungan Manajemen	:	Muhammad Fiqi Zulendra, S.S.T.Pi., M.Tr.Pi.

Bitung, 8 Januari 2025

Kepala Balai,



Natalia, S.St.Pi., M.Pi.

NIP. 19801225 200502 2 001